



LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"Analisis Disparitas Regional di Indonesia Tahun 2010 – 2015
(Studi Kasus : 33 Provinsi)"**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Fazrir Rahman
NIM : 145020107111022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **30 Juli 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof.Dr. Munawar , SE., DEA.
NIP.195702121984031003
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS
NIP. 195205151974121001
(Dosen Penguji I)
3. Al MuizzuddinFazaalloh, SE., ME
NIP. 198604032015041002
(Dosen Penguji II)

Malang, 30 Juli 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650311 198903 2 001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Fazrir Rahman**
Tempat, tanggal lahir : **Makassar, 25 September 1996**
NIM : **145020107111022**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Perencanaan Pembangunan**
Alamat : **Jalan Kumis Kucing No. 2G Iowokwaru, Kota Malang.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :
Analisis Disparitas Regional di Indonesia Tahun 2010 – 2015 (Studi Kasus: 33 Provinsi)
yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Munawar, SE., DEA.
NIP. 19570212 198403 1 003

Malang, 21 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Fazrir Rahman
NIM. 145020107111022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Fazrir Rahman

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 September 1996

Agama : Islam

Alamat Email : mfazrir@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (2002-2008) : SDN 01 Pekayon

SMP (2008-2011) : SMPN 184 Jakarta

SMA (2011-2014) : SMA Negeri 39 Jakarta

Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dipersyaratkan untuk mendapatkan derajat Sarjana Ekonomi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua dan segenap keluarga besar yang telah mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk kelancaran studi penulis. Terimakasih kepada para sahabat dan teman dekat penulis yang telah menjadi teman diskusi, selalu membantu dalam segala hal, selalu memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih tak hingga kepada Prof.Dr. Munawar , SE., DEA yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 khususnya, teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi yang saling memberikan semangat dan dukungan, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Terakhir, penulis meminta doa dan dukungan kepada teman-teman untuk kelancaran dan kemudahan untuk kehidupan di masa depan penulis. Sekian.

ABSTRAKSI

Rahman, Muhammad Fazrir. 2018. Analisis Disparitas Regional di Indonesia Tahun 2010 – 2015 (Studi Kasus : 33 Provinsi). Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Prof.Dr. Munawar, SE., DEA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel angkatan kerja, infrastruktur jalan provinsi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas regional yang terjadi pada 33 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pada hasil perhitungan tingkat kesenjangan antara wilayah dengan nilai Indeks Williamson pada 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 menggambarkan bahwa tingkat kesenjangan rata-rata antar provinsi pada tahun 2010 – 2015 masih cukup mengalami ketimpangan yang cukup besar. Namun jika berdasarkan pada masing masing provinsi tergambarkan bahwa ketimpangan yang terjadi pada masing masing provinsi cenderung menurun setiap tahunnya.

Kata kunci: *Disparitas regional, angkatan kerja, infrastruktur jalan provinsi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi.*

ABSTRACT

Rahman, Muhammad Fazrir. 2018. Analysis On Regional Disparity In Indonesia In The Period Of 2010-2015 (A Case Study In 33 Provinces). Minor Thesis, Economic Science Department, Economic and Business Faculty, Brawijaya University. Prof.Dr. Munawar, SE., DEA.

This study aims to determine the significance of labor force variables, provincial road infrastructure, life expectancy, average length of school and economic growth to regional disparity that occurred in 33 Provinces in Indonesia. In the calculation of the gap between the region with the value of Williamson index in 33 Provinces in Indonesia from 2010 to 2015 illustrates that the average gap between provinces in 2010 to 2015 is still sufficiently large inequality. However, if based on each province illustrated that the inequality that occurs in the province tends to decline every year.

Keywords: *Development disparities, labor force, provincial road infrastructure, life expectancy, average length of school and economic growth.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan ridho-Nya serta kasih sayang-Nya terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Disparitas Regional di Indonesia Tahun 2010 – 2015 (Studi Kasus : 33 Provinsi)**". Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Namun, berbagai kendala tersebut dapat diatasi berkat banyaknya bantuan dan dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis begitu besar yang tak terhingga.
2. Roni Sudarsono dan Ivy Noviany selaku orang tua dari penulis, yang selalu memberi dukungan baik lahir maupun batin. Selalu membuat penulis merasa nyaman ketika di rumah maupun ketika penulis berada jauh dari rumah. Tempat cerita penulis ketika penulis sedang dilanda masalah baik akademik, sosial maupun kehidupan sisi lain dari penulis.
3. Rovina Savatira selaku kakak dari penulis yang sering membuat penulis kesal terhadap dirinya namun tetap penulis sayang dengan sepenuh hati penulis. Dan semoga kehidupan kakak penulis selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT.
4. Uti dan Eyang Mami serta papap amir dan eyang papi yang telah lebih dulu meninggalkan dunia ini, yang selama hidupnya selalu mendoakan saya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta keluarga dan menjadi anak yang sholeh selalu berada pada jalan yang baik.

5. Pap Indra, Ma Endang dan Adek Radith keluarga yang penulis anggap paling dekat terimakasih atas segala dukungan secara langsung ataupun tidak langsung.
6. Pap Heri, Pap Ari, Pap Yudi, Pap Rudi, Wa Toni dan Ma Athun, Ma Angky, Ma Windy, Ma Neni, Wa Diah serta saudara sepupu reihan, ulfiah, ridho, nabila, rafi, sifa, fadel, fadhia, audy, indy, medina, teh ika, nita yang penulis anggap sebagai keluarga yang paling dekat terimakasih atas segala dukungan serta doa-doanya.
7. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
8. Bapak Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
9. Ibu Nurul Badriyah, SE., ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas.
10. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
11. Prof. Dr. Munawar, SE., DEA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran, dan membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
12. Prof. Dr. M. Pudjiharjo, SE., MS dan Bapak Al Muizzuddin Fazaalloh, SE., ME selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi.
13. *Best Supporters*, Ulfa Rabbina selaku sahabat seperjuangan dari awal hingga akhir pengerjaan Skripsi penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan bantuan apapun.
14. Deiral, Aldy, Amang, Jonson, Renno, Jawa, Jordi dan Faris teman satu kosan penulis mulai dari maba hingga saat skripsi ini telah selesai ditulis atas dukungan serta senyum ketika penulis sedang dalam keadaan tidak

- baik. Disusul oleh rasyid teman yang selalu berada dikosan saya baik dari awal maupun hingga akhir dia angkat kaki dari malang.
15. Ghazi, Fathin, Teddy, Ghufon, Dimas 1, Dimas 2, Aji, Komang, dan Nanda selaku teman sepermainan penulis mulai dari umur 3 tahun yang selalu menanyakan proses kuliah penulis.
 16. Teman teman satu perguruan arah berbicara dan diskusi oday, bimo, hans, aji, tio, kevin, bagus, pace/depe, ipang, bang ocit, angga, ali, syihab, sandy terimakasih banyak dari penulis atas segala masukannya baik dalam akademik maupun sosial.
 17. Shabrina selaku kakak angkat saya dimalang dan asri, rizka, ajeng yang siap membantu penulis dalam kesusahan baik mendadak maupun tidak walaupun terlihat sangat palsu.
 18. Dhika dan Gyda selaku teman magang saya selama 25 hari di Kementerian Perdagangan yang selalu saling membantu dalam setiap keadaan mendesak.
 19. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 yang saling memberikan semangat dari awal skripsi hingga selesai.
 20. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang belum dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis adalah skripsi yang telah disusun bisa bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk masa mendatang, khususnya seluruh civitas

akademika. Penulis juga berharap skripsi ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, Agustus 2018

Muhammad Fazrir Rahman



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Definisi dan Terminologi Disparitas.....	18
2.1.2 Teori Pembangunan Tidak Seimbang.....	22
2.1.3 Teori Pembangunan Seimbang	24
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas.....	31
2.1.5 Hubungan Jumlah Penduduk Bekerja Terhadap Disparitas pembangunan.....	32
2.1.6 Hubungan Pendidikan dan Disparitas Pembangunan	33
2.1.7 Konsep Ketimpangan dan Kesenjangan Pembangunan	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pikir.....	45
2.4 Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Ruang Lingkup Penelitian	49
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	49
3.3 Metode Pengumpulan Data	51
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Metode Analisis Data.....	51
3.4.1 Estimasi Model Data Panel.....	51
3.4.2 Model Analisis	56
3.4.2.1. Analisis Faktor Penyebab Disparitas	56
3.5 Metode Pengujian.....	58
3.5.1 Uji Hipotesis	58
3.5.1.1. Uji F	58
3.5.1.2. Uji T	59
3.5.1.3. Koefisien Determinasi (Goodness of Fit)	60
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	61
3.5.2.1. Uji Normalitas.....	61
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas	61
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	62
3.5.2.4. Uji Autokorelasi	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	64
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	66
4.2.1 Indeks Williamson	66
4.2.2 Angkatan Kerja.....	68
4.2.3 Infrastruktur Jalan	69
4.2.4 Angka Harapan Hidup	70
4.2.5 Rata-Rata Lama Sekolah	71
4.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi	72
4.3 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan	73
4.3.1 Uji Chow.....	74
4.3.2 Uji Hausman	75
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)	76
4.3.4 Pengujian Hasil Analisis Regresi.....	77
4.3.4.1. Angkatan Kerja	79
4.3.4.2. Panjang Jalan	82
4.3.4.3. Angka Harapan Hidup.....	83
4.3.4.4. Rata-Rata Lama Sekolah	84
4.3.4.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	----

LAMPIRAN	96
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Dasar	21
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....	74
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman.....	75
Tabel 4.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	76
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi	77
Tabel 4.5 Pengkelasan Rata-Rata Angkatan Kerta 33 Provinsi 2010-2015...	81
Tabel 4.6 Pengkelasan Provinsi Berdasarkan RRLS 2010-2015	85
Tabel 4.7 Pengkelasan Provinsi Berdasarkan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 2010-2015.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 – TW II 2017	5
Gambar 1.2 Indeks Wiliamson Indonesia tahun 2010 - 2015	6
Gambar 1.3 Tingkat Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 - 2015.....	14
Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	10
Gambar 1.5 Angka Harapan Hidup Indonesia.....	11
Gambar 1.6 Rata – Rata Laju Pertumbuhan 2011 - 2016	13
Gambar 2.1 Sudut Pandang Disparitas Regional.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	45
Gambar 4.1 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	64
Gambar 4.2 Rata-Rata Indeks Williamson 33 Provinsi 2010-2015.....	66
Gambar 4.3 Angkatan Kerja Rata-Rata 33 Provinsi 2010-2015	68
Gambar 4.4 Rata-Rata Panjang Jalan 33 Provinsi 2010-2015.....	68
Gambar 4.5 Rata-Rata Angka Harapan Hidup 33 Provinsi 2010-2015.....	70
Gambar 4.6 Rata-Rata Lama Sekolah 33 Provinsi 2010-2015.....	71
Gambar 4.7 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi 2010-2015.	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sebagai negara dengan iklim tropis yang berada tepat dibawah garis khatulistiwa memberikan suatu keuntungan yang terkhususkan bagi Indonesia. Keberuntungan letak geografis ini memberikan anugerah berupa tanah yang subur bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di Indonesia. Selain memiliki populasi dan wilayah yang luas Indonesia juga merupakan negara yang memiliki wilayah alam yang mendukung keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang besar diluar pulau jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Dalam hal gas alam Indonesia termasuk pengeksportir gas alam terbesar kelima di dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya, hal ini menggambarkan bahwa Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang berasal dari laut. Kekayaan alam yang Indonesia miliki ini memberikan keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan negara lain.

Kekayaan yang dimiliki membantu Indonesia untuk lebih mampu bersaing dengan negara berkembang lainnya dalam perkembangan perekonomiannya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dengan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,6

persen selama 8 tahun terakhir. Setiap negara berkembang pasti menjadikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai target utama dalam memperbaiki perekonomiannya. Dengan harapan bahwa semakin baiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan negara tersebut. Namun jika dilihat dengan baik pertumbuhan ekonomi yang pesat pada suatu negara tidak selalu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara merata. Hal ini biasa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang pesat pada suatu negara di dorong oleh beberapa daerah saja, lebih terpusat dan terkhususkan pada daerah tertentu. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih didorong perekonomian dari pulau jawa terutama Jakarta sebagai ibukota, hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya ketidak merataan pertumbuhan ekonomi. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara nantinya akan menimbulkan fenomena disparitas antar wilayah.

Setiap daerah mempunyai potensi sumber daya yang berbeda-beda satu daerah dengan yang lainnya dan juga struktur ekonominya, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk pengelolaan potensi sumber daya secara baik dan benar. Dengan demikian diharapkan potensi sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong aktivitas perekonomian kearah yang lebih baik. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak daerah sehingga setiap daerah memiliki tingkat pembangunan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk mendorong semua daerah secara bersamaan dan sama. Karena semua berdasarkan pada karakteristik setiap daerah, dimana tidak ada satupun daerah yang memiliki karakteristik yang sama persis (Kartasasmita, 1997). Pada

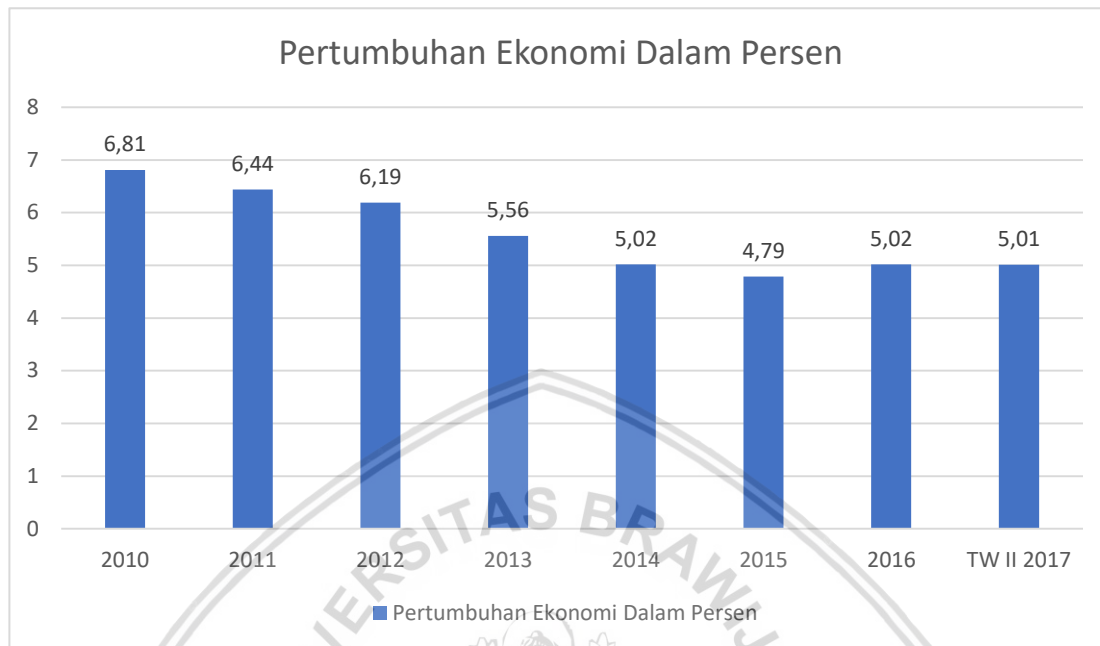
awalnya pembangunan ekonomi nasional di Indonesia dimulai dan dipusatkan di Pulau Jawa serta diprioritaskan pada sektor-sektor tertentu yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan strategi pembangunan ekonomi tersebut Indonesia mampu menikmati peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diikuti dengan adanya kesenjangan yang juga semakin besar (Tambunan 2001).

Dalam setiap pembangunan nasional jika terjadi disparitas atau ketimpangan antar daerah adalah merupakan hal yang wajar. Dikarenakan adanya perbedaan laju pertumbuhan antarprovinsi di Indonesia telah memberikan dampak adanya disparitas pendapatan antarprovinsi. Setelah mengalami disparitas antarwilayah dalam hal pertumbuhan ekonomi nantinya akan mencapai titik dimana perbedaan laju provinsi akan menurun dan peningkatan pemerataan pendapatan perkapita rata-rata di setiap provinsi sesuai dengan hipotesis Kuznets yang dikenal dengan "Hipotesis U terbalik".

Banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang disertai dengan persebaran potensi sumberdaya yang tidak merata pada setiap daerah sehingga menimbulkan disparitas/ketimpangan dalam laju pembangunan ekonomi antara daerah. Menentukan sektor potensial setiap daerah merupakan hal yang penting ketika daerah memiliki kekuasaan sendiri dalam mengatur perekonomiannya (otonomi daerah). Penentuan sektor potensial dilakukan guna mendorong dengan baik perekonomian untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan GDP merupakan masalah pokok dalam pembangunan ekonomi selain itu juga ada pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan dalam masyarakat.

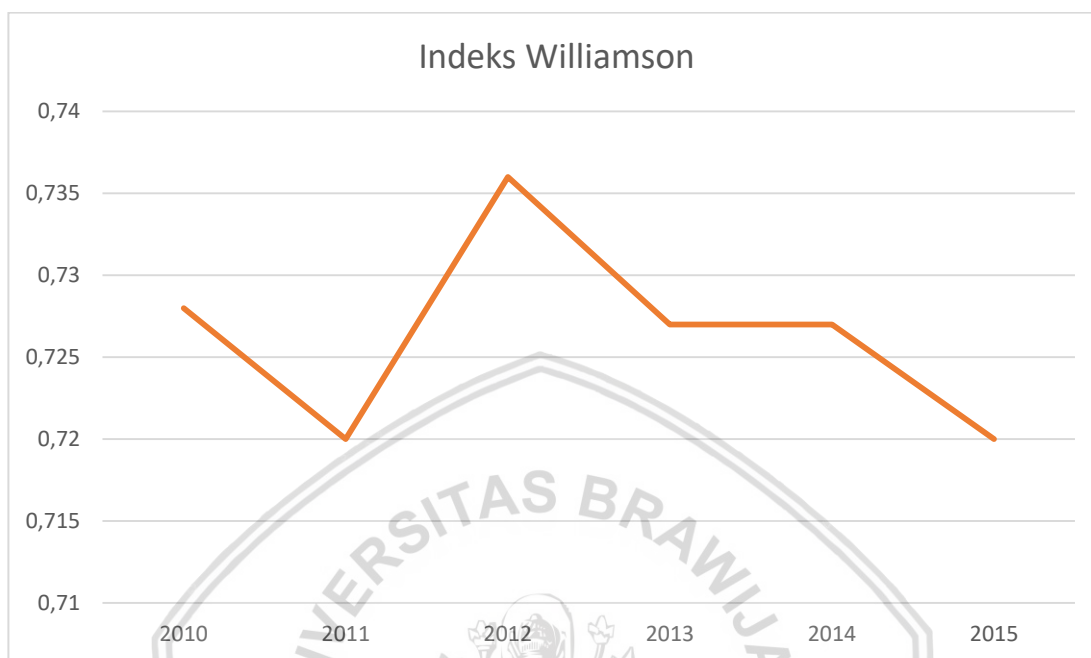
Pertumbuhan ekonomi selama ini sepertinya belum mampu memberikan distribusi pendapatan yang adil serta merata bagi masyarakat Indonesia, disebabkan karena adanya kesenjangan antar sektor yang berakibat pada tidak meratanya pendistribusian pendapatan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Faktor pemicunya bisa berasal dari kurangnya tingkat pendidikan, keterampilan, rendahnya tingkat kesehatan,, tidak adanya faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak memilikinya akses untuk permodalan serta pemasaran hasil produksi pertanian, sehingga kurangnya produksi yang dihasilkan dan berakibat kepada kurangnya pendapatan masyarakat (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama setiap negara, terlebih lagi bagi negara berkembang. Dalam hal ini yang diinginkan merupakan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi pada masing masing daerah di suatu negara. Karena melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung mampu memberikan pengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan merupakan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan berimplikasi pada timbulnya ketimpangan pendapatan perkapita antar daerah. Pertumbuhan Indonesia dari 2010 hingga 2017 dapat kita lihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 – TW II 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Bagi negara dunia ketiga/negara sedang berkembang, kesenjangan akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan dinegara sedang berkembang pendapatan perkapita sangat sulit untuk ditingkatkan karena adanya pertumbuhan penduduk secara regional dan secara nasional. Ketimpangan ekonomi regional dalam perekonomian bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi hampir diseluruh negara didunia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat heterogen menjadikannya persoalan ketimpangan di Indonesia menarik untuk diteliti. Beberapa hasil penelitian mengenai ketimpangan di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ketimpangan tersebut tidak semakin turun dari waktu ke waktu (Sudarmono, 2006).

Gambar 1.2 Indeks Williamson Indonesia tahun 2010-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar diatas menunjukkan tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015 yang digambarkan melalui Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan ukuran tingkat ketimpangan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antara wilayah. Dengan perhitungan dasar menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan penduduk. Dengan nilai Indeks antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), dimana ketika mendekati nol maka ketimpangan yang terjadi antar wilayah rendah dan pertumbuhan terjadi secara merata. Jika indeks mendekati 1 maka ketimpangan antar wilayah tinggi dan pertumbuhan ekonomi berjalan tidak merata antar wilayah. Ketimpangan di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 cenderung menurun setiap tahunnya kecuali pada tahun 2011 ke 2012 ketimpangan di Indonesia mengalami sedikit peningkatan. Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di

Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat dalam hal pemerataan antara wilayah karena dalam Indeks tersebut menggambarkan tingkat ketimpangan yang semakin mendekati angka nol, meskipun bila kita perhatikan tingkat ketimpangan di Indonesia itu sendiri masih sangat tinggi.

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang tidak akan luput dari pembangunan suatu daerah. Ketimpangan memiliki fungsi sebagai pendorong bagi daerah terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya agar terhindar dari ketertinggalan yang mendalam dengan daerah sekitarnya. Ketimpangan juga mendorong daerah-daerah tertinggal untuk mampu bersaing dengan daerah lainnya dengan target peningkatan kualitas hidupnya, sehingga dalam hal ini ketimpangan memberikan dampak yang positif. Selain itu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah juga memberi dampak negatif. Dampak negatif tersebut merupakan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

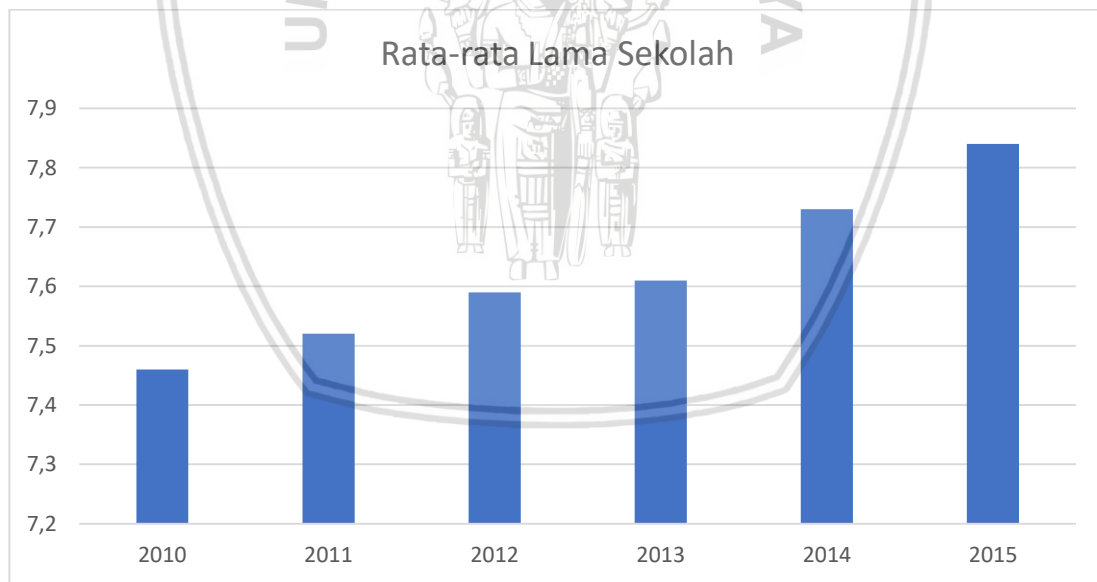
Todaro (2000), menyatakan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan dalam kelompok sektor primer, sekunder dan tersier di dunia ketiga atau negara berkembang, yaitu:

- a. Ketimpangan yang terjadi di sektor primer disebabkan oleh kemampuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya berada dan masih berlanjutnya praktek pertanian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
- b. Faktor-faktor yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan di sektor sekunder adalah terpusatnya kepemilikan asset dan modal baik secara fisik

maupun finansial di tangan golongan tertentu, sehingga peranan lebih besar ditangani oleh pihak yang memiliki asset dan modal tersebut.

- c. Dalam sektor tersier atau sektor modern, tingkat pendidikan sangat berperan untuk mendapatkan pekerjaan disektor ini. Ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat upah yang diterima bagi orang yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Perbedaan tingkat pendidikan terjadi karena mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak semua masyarakat dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi. Ketimpangan yang ada pada ketiga sektor tersebut, jika tidak teratasi maka akan berdampak terhadap lebarnya ketimpangan regional antar wilayah.

Gambar 1.3 Tingkat Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2010 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

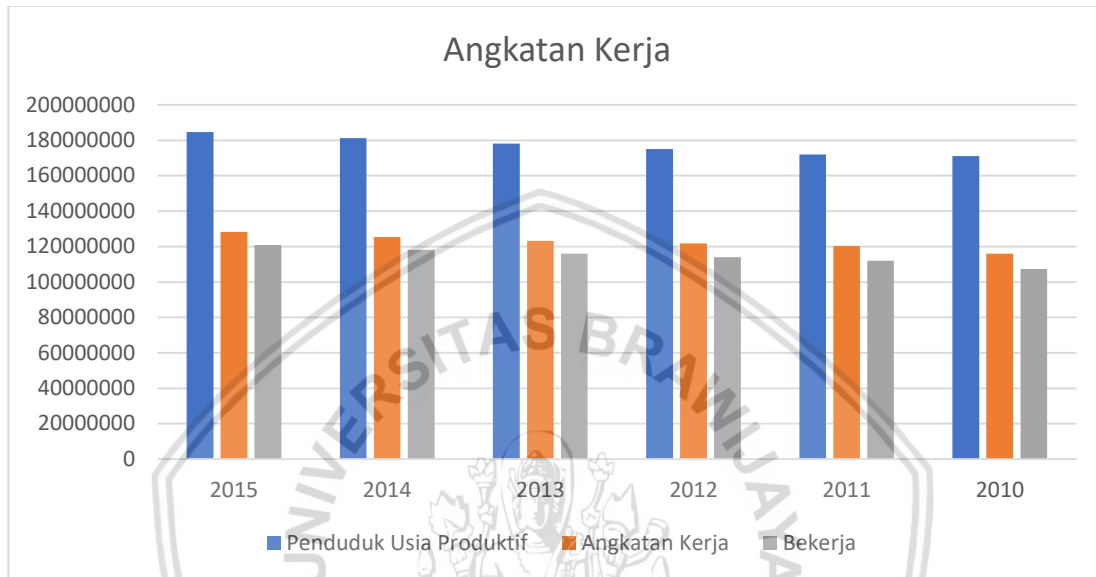
Berdasarkan pada gambar 1.3 menjelaskan tingkat rata-rata lama sekolah pada masyarakat Indonesia. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun

belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal, yang berfungsi sebagai petunjuk jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang (sirusa bps). Pada tahun 2010 sampai 2015 dapat kita perhatikan bahwa tingkat rata-rata lama sekolah pada masyarakat Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan yang menggambarkan bahwa masyarakat yang berumur lebih dari 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan untuk memiliki tingkat pendidikan dengan jenjang yang semakin tinggi setiap tahunnya. Namun dengan begitu belum menggambarkan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada setiap daerahnya, tingkat pemerataan pendidikan sendiri jika dilihat secara langsung cenderung terpusat pada kota-kota besar terutama dipulau Jawa dalam hal infrastruktur dan akses kemudahan fasilitas. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu hal dari beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh pada tingkat pembangunan di daerah, karena dalam hal ini pendidikan biasa diartikan sebagai kualitas modal manusia. Kualitas modal manusia sendiri mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di masing masing daerah berbeda dengan tingkat pertumbuhan atau pembangunan pada daerah lainnya.

Selain rata-rata lama sekolah, angkatan kerja juga merupakan hal yang mampu memberikan pengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi pada setiap daerah, karena semakin banyaknya angkatan kerja yang ikut serta dalam menjalankan roda perekonomian semakin baik pula pertumbuhan ekonomi yang mampu dihasilkan di masing-masing daerah. Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang berada pada usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dalam hal ini di Indonesia secara keseluruhan setiap tahunnya jumlah angkatan kerja semakin

meningkat diiringi dengan meningkatnya partisipasi bekerja serta penurunan pada jumlah pengangguran terbuka. Hal tersebut dapat tergambarkan pada gambar 1.4 :

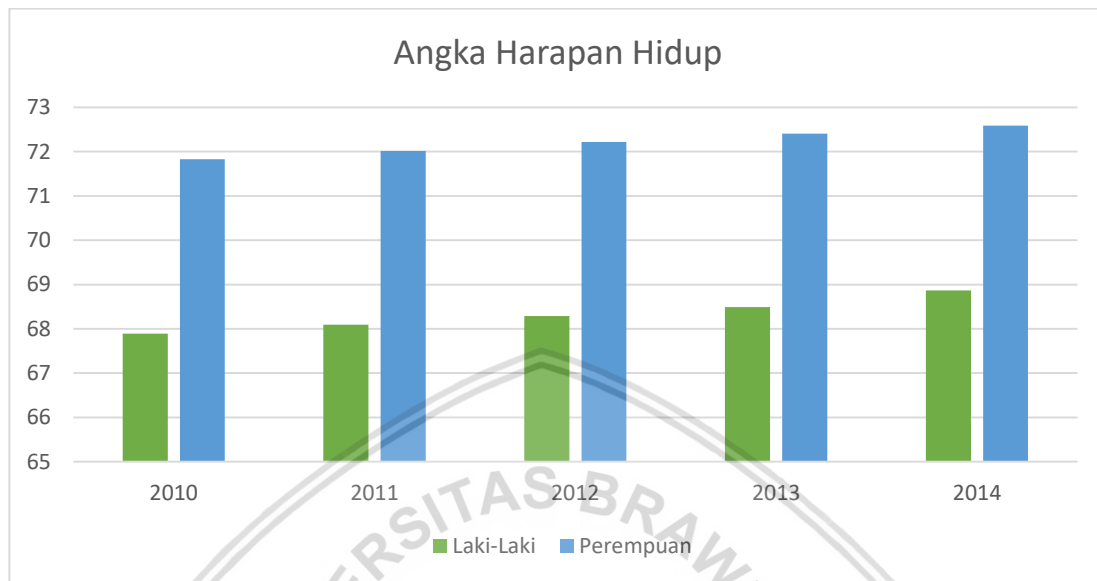
Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Dari gambar diatas dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa tingkat penduduk usia produktif maupun angkatan kerja setiap tahunnya cenderung meningkat, dengan diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sendiri merupakan bagian dari angkatan kerja namun belum menjalani pekerjaan yang biasa disebabkan belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan.

Dalam hal kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup dapat menggambarkan seberapa merata pembangunan untuk setiap daerah dalam fasilitas kesehatan yang menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk tingkat harapan hidup di Indonesia secara keseluruhan dapat kita lihat pada gambar 1.5 :

Gambar 1.5 Angka Harapan Hidup Indonesia

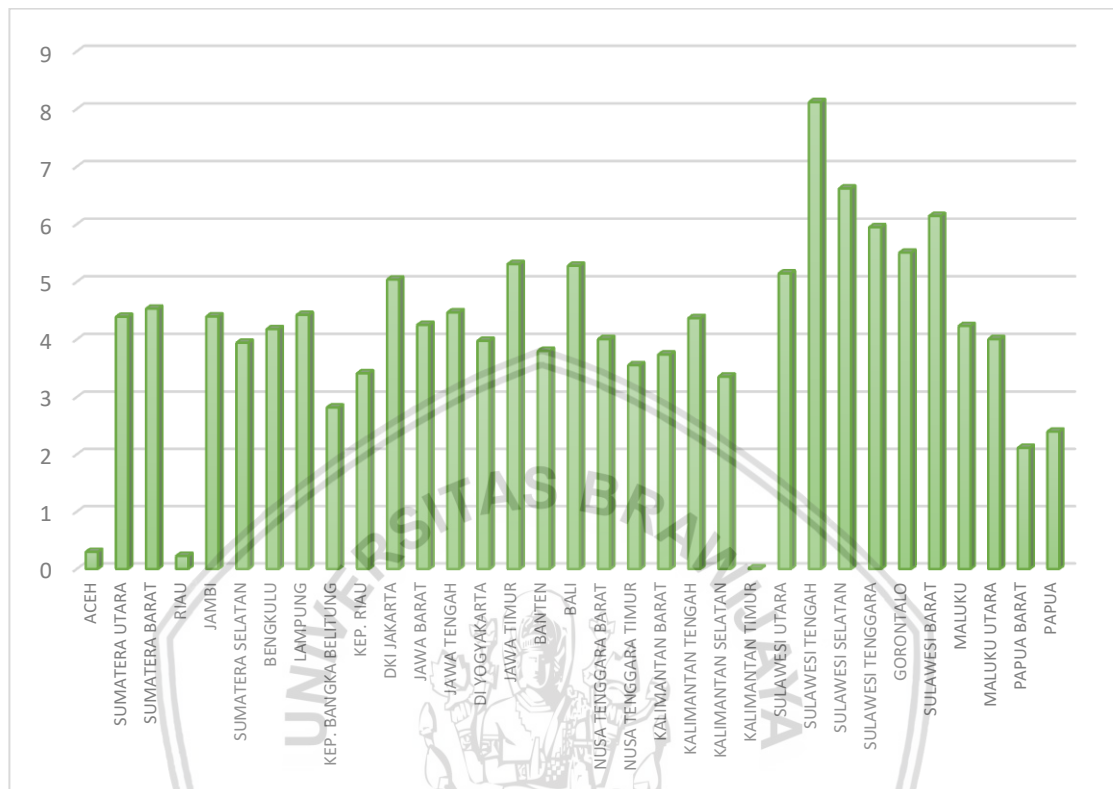
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Angka Harapan Hidup menurut bps merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Angka Harapan Hidup juga memiliki fungsi untuk mengavaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dengan memberikan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi termasuk dengan program pemberantasan kemiskinan. Dan pada tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun angka harapan hidup untuk masyarakat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat pada penduduk perempuan maupun laki-laki, hal ini juga menggambarkan bahwa pembangunan derajat kesehatan di Indonesia bila dilihat secara keseluruhan sudah semakin membaik. Namun bila dilihat secara masing-masing daerah hal tersebut tidaklah berlaku dimana di setiap

daerah memiliki angka harapan hidup yang berbeda-beda yang disebabkan adanya ketimpangan dalam hal pembangunan derajat kesehatan yang memberikan pengaruh terhadap angka harapan hidup untuk setiap daerahnya

Dalam setiap pembangunan di setiap daerah tidak bisa luput dari adanya kesenjangan atau ketimpangan, karena ketimpangan itu sendiri merupakan tahap perubahan dalam pembangunan. Namun ketimpangan atau perbedaan tingkat pembangunan yang berlebihan antar daerah akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*), ataupun memberikan pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, sehingga akan menimbulkan proses ketidak seimbangan. Secara normal pelaku-pelaku yang memiliki kekuatan dipasar akan cenderung meningkat dalam perekonomian, sehingga akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan antar daerah. Pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi juga harus mampu mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Kesempatan kerja bagi penduduk akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000). Ketimpangan yang terjadi di setiap daerah dapat dilihat melalui diagram batang dibawah ini yang menggambarkan perbedaan laju pertumbuhan setiap daerah.

Pada setiap daerah tingkat pembangunannya dapat dipengaruhi dengan banyak atau sedikitnya masyarakat yang berusia diatas 15 tahun ikut berpartisipasi dalam menjalankan roda perekonomian. Hal ini dapat digambarkan secara garis besar di Indonesia pada gambar 1.6 :

Gambar 1.6 Rata-Rata Laju Pertumbuhan 33 Provinsi 2011-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan diagram batang di atas rata-rata laju pertumbuhan pada setiap Provinsi di Indonesia sangatlah berbeda satu dengan yang lainnya. Aceh, Riau dan Kalimantan Timur merupakan 3 daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan terbawah dengan nilai pertumbuhan sebesar dibawah 0.3% yang sangat berbanding terbalik dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat yang merupakan 3 daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan teratas dengan nilai pertumbuhan diatas 6%. Diagram diatas menggambarkan bahwa masih terdapat fenomena disparitas yang serius pada setiap Provinsi di Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses dimana suatu negara mengalami peningkatan pendapatan perkapita dalam kurun waktu yang panjang, dengan syarat bahwa penduduk yang hidup didalam/bawah garis kemiskinan absolute jumlahnya tidak mengalami peningkatan dan pendistribusian pendapatan tidak semakin timpang. Faktor penyebab terjadinya ketimpangan antarwilayah di Indonesia sendiri dapat disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi suatu wilayah, alokasi investasi, perbedaan potensi SDA dan kondisi geografis di setiap wilayah, tingkat mobilitas faktor produksi antarwilayah, kurang memadainya infrastruktur yang berdampak pada terhambatnya distribusi barang dan jasa antarwilayah (Tambunan dalam Sugiharti 2012). Sedangkan menurut Rustiadi, R, & E., (2010), penyebab terjadinya ketimpangan di Indonesia yakni adanya proses pembangunan yang tidak merata, dimana pembangunan di Indonesia lebih sering berawal dan terkonsentrasi di Pulau Jawa serta terjadinya hanya di perkotaan saja. Pola yang tidak seimbang dalam pembangunan ini, menyebabkan alokasi dan distribusi sumber daya alam menjadi buruk, sehingga terciptanya inefisiensi dan menciptakan struktur hubungan dan interaksi wilayah yang semakin lemah. Membahas tentang permasalahan ketimpangan sesungguhnya telah mengalami proses ketertinggalan yang pelan tapi pasti. Hal ini dikarenakan makin luasnya jurang ketimpangan itu sendiri baik ketimpangan pendapatan, pendidikan maupun ketimpangan kualitas institusi birokrasi di daerah bersangkutan (Lesmana, 2007).

Berdasarkan penelitian Putu Yusi Pramandari (2009) jumlah penduduk bekerja berpengaruh positif dan nyata terhadap disparitas pembangunan yang terjadi di Provinsi Bali serta angka melek huruf secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap disparitas pembangunan di Provinsi Bali. Selain itu berdasarkan

Tesis Jaoharul Alam (2006) IPM dianggap mampu mewakili tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi, karena sebagaimana diketahui bahwa IPM mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonomi diukur melalui tingkat pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan variabel ekonomi diukur dengan pendapatan masyarakat yang menunjukkan kemampuan daya beli. Dengan asumsi tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki IPM masih rendah menandakan bahwa masih kurang sejahteranya penduduk daerah tersebut. Infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita bernilai positif (0.316869) pada taraf signifikansi sebesar 1 persen, artinya variabel ini mempercepat pertumbuhan pendapatan per kapita. Setiap penambahan 1 poin Infrastruktur jalan kapita akan mempercepat pertumbuhan pendapatan sebesar 0.316869 berdasarkan Tesis Sri Karima Amalia yang berjudul Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

Pemerintah saat ini gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan nasional dalam segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2011), salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja), pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Salah satu

komponen penting terkait sumber daya manusia yaitu modal manusia (*human capital*). Modal manusia merupakan penggambaran terhadap pengembangan kapasitas manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Pengembangan sumberdaya manusia dinilai menjadi penggerak kemajuan ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Dengan adanya investasi awal terkait dengan perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan, pada masa mendatang akan dapat diperoleh aliran pendapatan yang lebih tinggi (Tommasi & Ierulli, 1995).

Untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap disparitas pembangunan dapat diambil dari beberapa sudut pandang yaitu ekonomi, sosial dan infrastruktur. Hal terpenting dalam pembangunan adalah bagaimana dapat meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat, melalui jumlah penduduk bekerja sebagai ukuran variabel ekonomi, meningkatnya tingkat kesehatan dan rata-rata lama sekolah sebagai perwakilan dari variabel sosial, dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan sebagai indikator infrastruktur. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam membentuk kebijakan untuk menurunkan tingkat disparitas pembangunan di Indonesia melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas pembangunan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis mencoba untuk meneliti hal tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Disparitas Pembangunan di Indonesia Tahun 2010-2015 (Studi Kasus: 33 Provinsi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah variabel angkatan kerja, infrastruktur jalan provinsi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pembangunan pada 33 Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel angkatan kerja, infrastruktur jalan provinsi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pembangunan yang terjadi pada 33 Provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi dan wawasan yang lebih terhadap para pembaca hasil penelitian ini, serta memperkaya pemahaman terhadap disparitas pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meberikan masukan dan tambahan referensi kepada pemerintah dalam guna membentuk kebijakan terhadap permasalahan disparitas pembangunan yang terjadi di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

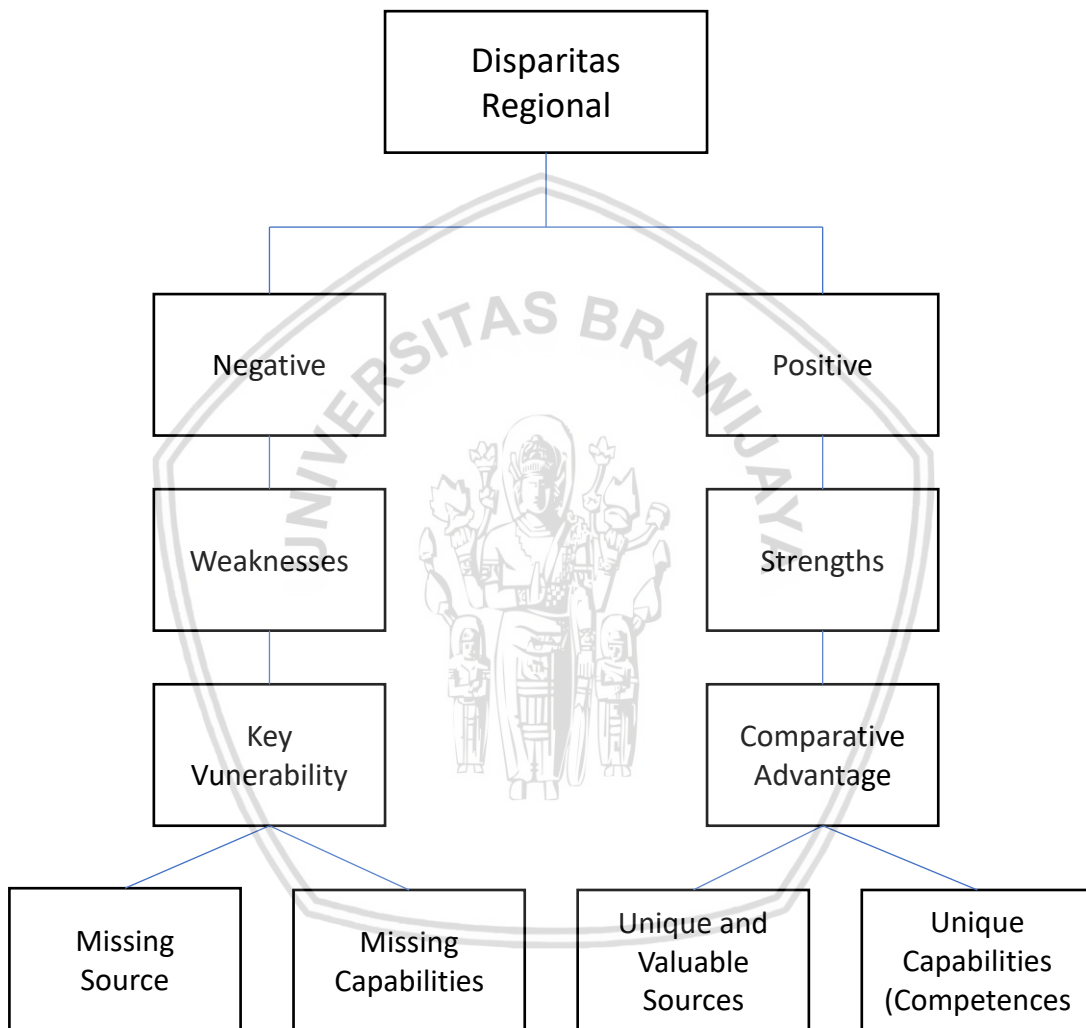
2.1.1 Definisi dan Terminologi Disparitas

Disparitas merupakan perbedaan atau ketidaksamaan karakter, fenomena atau proses, identifikasi dan peningkatan risiko dalam hal seperti sosial atau ekonomi. Hal tersebut biasanya memberikan dorongan pada terciptanya kesenjangan ekonomi. Sedangkan disparitas regional merupakan perbedaan atau kesenjangan yang terjadi antar negara atau wilayah dalam hal perekonomian dan kesejahteraannya serta terjadinya perbedaan fenomena antara wilayah satu dengan lainnya (OECD 2002, 2003), dan juga dapat diartikan sebagai ketidaksetaraan karakter, fenomena atau proses yang memiliki alokasi territorial spesifik dan terjadi setidaknya pada dua bagian wilayah atau lebih.

Menurut Karin Vorauer (2007) disparitas regional dipahami sebagai penyimpangan dari setiap pembagian referensi konsep yang dianggap relevan, dalam kaitannya antara wilayah satu dengan yang lainnya. Disparitas regional berarti ketidakseimbangan struktur wilayah antara satu dengan yang lainnya atau di beberapa wilayah. Hal tersebut di wakikan dengan kondisi kehidupan yang berbeda serta dalam potensi ekonomi dan pembangunan yang tidak setara. Kesenjangan antara kota dan desa juga dipahami sebagai bentuk disparitas spasial. Disparitas regional dapat digambarkan dengan dua sudut pandang, yang pertama kesenjangan regional yang dianggap negatif dan yang kedua kesenjangan regional yang memberikan

dampak positif pada setiap masing masing wilayah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 2.1 Sudut Pandang Disparitas Regional



Sumber : Regional disparities in regional development of the Czech republic Journal

Sudut pandang dalam memanda disparitas regional digunakan sebagai arahan dalam menentukan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi adanya disparitas antara wilayah serta untuk mendorong efisiensi dalam hal penggunaan potensi yang tersedia dalam suatu wilayah. Hal tesebut diharapkan mampu

memberikan dorongan terhadap wilayah yang memiliki perekonomian lemah untuk memperkuat perekonomiannya secara umum.

Disparitas regional dalam pengkelasan dibagi menjadi dua bagian kelas, yaitu:

1. Perspektif Vertikal, hal ini berdasarkan pada pengetahuan bahwa kesenjangan berubah sesuai dengan dimensi geografis; dalam penilaian kesenjangan menggunakan konteks geografis yang berbeda antara lain Dunia, Benua, Negara ataupun dimensi territorial yang berbeda seperti Negara, Wilayah(Provinsi), Kotamadya, dalam pandangan seperti ini akan menghasilkan kesenjangan yang berbeda beda. Disparitas cenderung mengalami peningkatan ketika terjadinya penurunan dimensi territorial pandangan.
2. Perspektif Horizontal, hal ini berhubungan dengan bidang subjek yang menyebabkan kemunculan disparitas itu sendiri. Klasifikasi dalam perspektif horizontal akan dilakukan sesuai dengan salah satu atribut yang merupakan dasar untuk semua klasifikasi, dan ruang lingkupnya disparitas regional. Pengklasifikasian dalam perspektif horizontal dibagi menjadi dua level seperti pada table dibawah ini:

a) Disparitas Sosial

1. Populasi, termasuk tingkat kehidupan, pendidikan, kesehatan, perpindahan penduduk, dan pemisahan penduduk berdasar rasa tau etnis (segregasi).
2. Infrastruktur Sosial, termasuk pelayanan kesehatan, system pendidikan, pelayanan sosial, budaya dan pemukiman.

3. Patologi Sosial termasuk pengecualian sosial, kriminalitas, dan tingkat kecelakaan.

b) Disparitas Ekonomi

1. Potensi ekonomi termasuk tingkat pertumbuhan, produktivitas dan hubungan eksternal ekonomi,
2. Struktur ekonomi termasuk struktur sektoral dan struktur berdasarkan pada subjek,
3. Potensi pembangunan termasuk penelitian dan pembangunan, modal luar negeri dan investasi,

Tabel 2.1 Klasifikasi Dasar

Klasifikasi level 1	Klasifikasi level 2
Sosial	Populasi Infrastruktur Sosial Patologi Sosial
Ekonomi	Potensi Ekonomi Struktur Ekonomi Potensi Pembangunan Manpower (SDM)
Teritorial	Potensi Geografi Fisik Lingkungan Hidup dan Alam Infrastruktur Lalu Lintas Infrastruktur Teknik

Sumber : Regional disparities in regional development of the Czech republic Journal

4. Manpower, termasuk penduduk usia produktif, pekerja, pengangguran dan mobilitas pekerja.

c) Teritorial

1. Potensi Geografi Fisik, termasuk sumber mineral, iklim, struktur pemukiman dan intensitas, kondisi lokasi dan lokalisasi wilayah,
2. Lingkungan Hidup dan Alam, termasuk udara, limbah, air, alam dan keanekaragaman hayati, hutan, daratan dan tanah,
3. Infrastruktur Lalulintas, termasuk jalan, rel kereta dan infrastruktur udara, transportasi air dan ketersediaan transportasi,
4. Infrastruktur Teknik, termasuk penyediaan air, pengelolaan limbah, penyediaan tenaga listrik, informasi dan teknologi komunikasi dan infrastruktur pariwisata.

2.1.2 Teori Pembangunan Tidak Seimbang

Hirschman (Arsyad, 2004:99) mengatakan bahwa Pola Pembangunan tidak seimbang dapat digambarkan melalui pertimbangan sebagai berikut: (1) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, (2) secara histories pembangunan ekonomi yang terjadi corak/polanya tidak seimbang, dan (3) pembangunan tidak seimbang ini akan menimbulkan kemacetan (*bottlenecks*) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang nantinya akan menjadi pendorong untuk pembangunan selanjutnya. Menurut Hirschman, investasi pada satu industry ataupun sektor-sektor yang strategis dinilai akan mampu membuka kesempatan investasi baru dan sebagai pembuka jalan bagi proses pembangunan selanjutnya, jika kita mengamati proses pembangunan yang

terjadi antara dua periode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang menggambarkan bahwa proses pembangunan yang berjalan dengan baik tidaklah seimbang. Perkembangan sektor yang dominan atau sektor pemimpin (*leading sector*) akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Jika dicontohkan dalam industry maka suatu industri tertentu akan merangsang atau mendorong perkembangan dari industri-industri lainnya. Hirschman menganggap bahwa pembangunan merupakan suatu “rantai disequilibrium” yang haruslah dipertahankan, bukan untuk dihapuskan.

Pembangunan tidak seimbang ini juga dianggap lebih sesuai untuk negara-negara yang menghadapi masalah kekurangan sumberdaya. Dengan dilaksanakannya program pembangunan tidak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh (*induced investment*) di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Dengan begitu sumberdaya yang langka dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan. Pembangunan tidak seimbang ini akan menciptakan gangguan atau hambatan yang berujung pada ketidak seimbangannya kegiatan ekonomi. Ketidak seimbangan ini akan menjadi perangsang atau pendorong untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang ini memiliki persoalan pokok yang dianalisis, yaitu bagaimana caranya untuk menentukan proyek dalam sektor mana yang harus didahulukan pembangunannya, dengan tujuan mendorong

sektor lainnya di kemudian, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumberdaya lainnya melebihi modal dan sumberdaya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumberdaya yang tersedia tersebut digunakan secara efisien dan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kemudian hari. Pengalokasian sumberdaya tersebut dapat dibedakan menjadi dua pilihan yaitu cara pilihan pengganti (*substitution choices*) dan cara pilihan penundaan (*postponement choices*).

Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan. Hirschman ternyata lebih memusatkan analisisnya pada acara yang kedua yaitu pilihan penundaan. Inti analisis Hirschman adalah penentuan prioritas dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan haruslah ditentukan atas dasar penilaian tentang tingkat kemampuan dari proyek tersebut dalam mendorong pengembangan proyek-proyek lainnya. Dengan begitu menggambarkan bahwa pembangunan tidak seimbang yang dikemukakan Hirschman bertujuan untuk menentukan proyek aman yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menjamin terciptanya pembangunan yang maksimal di waktu yang akan datang.

2.1.3 Teori Pembangunan Seimbang

Pembangunan Seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri yang dilaksanakan secara serempak atau bersamaan (*simultaneous*)

sehingga industry tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Teori Pembangunan Seimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor diharapkan dapat tumbuh bersamaan (Arsyad, 2004:89).

a) Rosenstein – Rodan dan Nurkse

Istilah Pembangunan Seimbang pelopori oleh Nurkse pada tahun 1953. Namun demikian, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Rosenstein – Rodan pada tahun 1953 yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di Eropa Selatan dan Tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah seperti ini agar lebih cepat daripada di daerah yang lebih kaya. Dalam upaya untuk melaksanakan program tersebut mereka berpendapat bahwa pembangunan industri haruslah dilaksanakan secara bersama. Tujuan dari strategi ini merupakan penciptaan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi. Scitovsky mendefinisikan eksternalitas ekonomi merupakan jasa-jasa yang diperoleh dengan Cuma-Cuma oleh sesuatu industry dari industry lainnya. Dengan begitu jika sebuah perusahaan memperoleh eksternalitas ekonomi, maka biaya produksinya dapat dikurangi dan perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih efisien. Menurut Rosenstein – Rodan, pembangunan industry secara besar-besaran akan menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi yaitu:

1. Di akibatkan oleh perluasan pasar
2. Karena industri yang sama letaknya saling berdekatan, dan
3. Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

Pendapat yang disampaikan oleh Nurkse hanya sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Rosenstein – Rodan. Nurkse menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal yang dibutuhkan, tetapi juga dalam proses menemukan pasar/target ekonomi bagi barang – barang industri yang akan dikembangkan dikemudian hari. Nurkse juga berpendapat bahwa investasi sangat rendah yang disebabkan oleh kecilnya daya beli masyarakat, sedangkan rendahnya daya beli itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat. Pendapatan riil rendah tidak lain disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Kemampuan daya beli dalam masyarakat merupakan target bagi barang-barang yang dihasilkan oleh sektor industri yang produktif. Kemampuan daya beli masyarakat yang rendah akan berdampak pada1 terbatasnya pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri yang produktif. Hal ini akan berimplikasi pada tidak tertariknya para pengusaha untuk melakukan investasi yang berguna untuk memperlancar produktivitas industri terutama dalam industry modern. Dorongan untuk melakukan investasi terbatas oleh luasnya pasar dan pasar sendiri dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Faktor terpenting dalam hal ini adalah pasar, karena pasar akan membatasi investasi di sektor modern, maka dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan program pembangunan menentuka factor yang dapat memperluas pasar domestic merupakan persoalan yang harus dipecahkan.

Nurkse mengatakan bahwa ekspansi moneter, iklan-iklan, jumlah penduduk, tidak dapat memperluas pasar domestic. Selain itu Nurkse juga mengayatakan

bahwa factor yang terpenting dalam menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas. Dalam suatu perekonomian yang mempunyai jumlah penduduk tertentu, jumlah barang-barang yang dapat dihasilkan dan dijual dalam suatu jangka waktu tertentu tergantung pada tingkat penggunaan modal dalam proses produksi. Dalam suatu perekonomian yang pasarnya terbatas, maka tidak ada rangsangan bagi para pengusaha untuk menggunakan alat-alat yang modern. Keadaan seperti ini mengindikasikan bahwa pasar telah membatasi penggunaan modal sehingga membatasi pula kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu negara sedang berkembang yang sedang giat dalam tahapan proses pembangunan seimbang yakni pada waktu yang bersamaan dilakukan investasi diberbagai industri yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Dengan cara ini berarti pasar akan berkembang semakin luas, karena kesempatan kerja yang tersedia dan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari berbagai industry akan menciptakan permintaan akan barang-barang industry yang dihasilkan.

Nurkse mempunyai pendapat yang sama dengan Rosenstein-Rodan mengenai peranan perluasan pasar dalam guna mempertinggi efisiensi suatu industri yakni pasar merupakan eksternalitas ekonomi bagi berbagai industri. Nurkse juga menganggap bahwa perluasan pasar tersebut merupakan eksternalitas ekonomi yang lebih penting daripada eksternalitas ekonomi yang telah dikemukakan oleh Marshall, seperti memperbaiki jaringan transportasi dan komunikasi, perbaikan tingkat teknologi, dan perbaikan tingkat keterampilan serta keahlian tenaga kerja. Eksternalitas ekonomi yang disebabkan oleh perluasan pasar dan eksternalitas ekonomi yang tradisional, menurut Nurkse dan Rosenstein-Rodan, menyebabkan

perbedaan yang besar sekali diantara produktivitas modal marginal dari suatu perusahaan (private marginal productivity of capital) dan produktivitas modal marginal dari masyarakat keseluruhan (social marginal productivity of capital). Perbedaan yang sangat besar diatas mempunyai arti bahwa dorongan atau rangsangan bagi suatu perusahaan untuk melakukan investasi seringkali tidak cukup besar karena kecilnya pasar. Namun demikian, jika ditinjau industry secara keseluruhan, maka rangsangan tersebut sangat besar. Oleh karena jika sejumlah besar industry dikembangkan maka secara bersama-sama setiap industry mengalami perluasan pasar yang sangat besar sekali bagi produk-produknya.

b) Scitovsky dan Lewis

Hirschman memandang Scitovsky dan Lewis sebagai pencipta dari Teori Pembangunan yang menekankan perlunya keseimbangan dalam penawaran, sedangkan Rosenstein-Rodan menekankan pada sisi permintaan. Scitovsky mengungkapkan adanya 2 konsep eksternalitas ekonomi dan manfaat yang diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalitas ekonomi yang ada dalam perekonomian tersebut. Eksternalitas ekonomi sendiri dapat dibedakan menjadi 2 eksternalitas, yaitu seperti yang terdapat dalam teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dan seperti yang terdapat dalam Teori Pembangunan. Dalam Teori Keseimbangan (Teori Ekonomi Konvensional), eksternalitas ekonomi biasa diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industry sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industry lain. Eksternalitas ekonomi seperti ini disebut eksternalitas ekonomi teknologis (*technological external economics*). Disamping itu hubungan saling ketergantungan antara berbagai industry bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (*pecuniary external economics*) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang

disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain. Dengan kata lain keuntungan suatu perusahaan bukn saja tergantung pada efisien atau tidaknya penggunaan faktor-faktor produksi dan tingkat produksi perusahaan tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan faktor-faktor produksi dan tingkat produksi perusahaan lainnya terutama yang dengan perusahaan yang tidak jauh beda dalam bidang operasinya dengan perusahaan yang pertama.

Sementara itu analisis Lewis menunjukkan perluna pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian, dalam negeri, dan luar negeri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan harga dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industry dan sektor pertanian. Misalkan disektor pertanian terjadi inovasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Implikasinya yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

1. Terdapat surplus disektor pertanian yang dapat dijual disektor non pertanian, atau
2. Produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran bertambah tinggi, atau
3. Gabungan dari kedua keadaan tersebut.

Jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (*terms of trade*) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh karena itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi. Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang tersebut. Inflasi kemungkinan akan terjadi yang disebabkan oleh dorongan dari keadaan seperti ini. Masalah lainnya adalah kesulitan untuk menjual barang-barang industri dengan menguntungkan. Peningkatan harga pada barang pertanian dapat memberikan dorongan terhadap kenaikan upah di dalam sektor industri, sedangkan harga barang industri tidak dapat dinaikkan untuk menjaga pasar yang telah ada atau, jika pendapatan petani dipertahankan supaya tetap rendah, maka mereka tidak akan mampu membeli barang-barang industri dan oleh karenanya pasar dari produk industri akan tetap terbatas, kecuali jika pasar luar negeri bisa dikembangkan atau pemerintah yang membeli barang-barang tersebut. Kedua langkah yang terakhir tersebut juga mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menciptakan pasar bagi industri.

Jika sektor pertanian tidak berkembang dengan baik, maka hal ini juga akan menggambarkan bahwa sektor industri juga tidak akan berkembang, dan

keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun tingkat investasi akan tetap dalam tingkat yang rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor saja: pertanian atau industri, maka Lewis menyimpulkan bahwa, pembangunan haruslah dilakukan secara bersama-sama di kedua sektor tersebut.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas

Dalam studi tentang disparitas regional disepakati menggunakan hipotesis Williamson sebagai titik awal pembelajaran. Berdasarkan pada hipotesis tersebut menjelaskan bahwa ketika ekonomi nasional berkembang dari negara awal, ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah akan meningkat pada tingkat tertentu, setelah itu ketidaksetaraan itu akan berkurang mengarah kepada pemerataan antar wilayah. Disparitas regional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya termasuk migrasi tenaga kerja, migrasi modal, keterkaitan dan kebijakan pemerintah (Fisch, 1984).

Disparitas regional terjadi di banyak negara, terlepas dari keterbukaan ekonomi nasional. Menurut Cuaresma (2014) faktor utama terjadinya disparitas regional adalah adanya perbedaan sumber daya manusia antar daerah yang berkontribusi terhadap tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi pada kota-kota besar dan juga wilayah yang memiliki sumber daya alam dan energi yang kaya membuat disparitas regional menjadi lebih besar (Benin dan Czyzewski, 2007). Hal tersebut memberikan dorongan terhadap semakin berkembangnya wilayah yang memiliki

kelebihan tersebut dibandingkan dengan wilayah yang terbelakang atau kurang dalam sumber daya manusia maupun alamnya.

Karakteristik dasar ekonomi modern adalah keterbukaan perbatasan nasional dan perkembangan cepat pada ilmu pengetahuan serta teknologi, maka dari itu butuh untuk mengatuhui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan regional bersamaan dengan semakin terlihatnya persaingan pertumbuhan antar daerah (Petrakos, 2007). Menurut Bachtler (2000), investor asing berpindah menginvestasikan modalnya ke daerah perbatasan atau pusat karena pada daerah tersebut pasar yang tersedia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pasar di daerah lainnya. Dasar teori neoklasik menggambarkan bahwa pergerakan modal dari daerah maju ke daerah yang belum berkembang menyebabkan disparitas regional dalam tingkat keuntungan yang didapatkan. Perbedaan dalam jumlah laba menentukan tingkat pergerakan modal dari yang dikembangkan ke daerah yang belum berkembang. Hal tersebut berbeda dengan modal bergerak seperti tenaga kerja, tenaga kerja dari daerah belum berkembang cenderung berpindah menuju ke daerah yang lebih maju. Tingkat pergerakan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat penghasilan yang tersedia pada daerah tertentu. Berdasarkan pada paradigma ini, Solow (1956) menyatakan bahwa disparitas regional dapat berkurang dalam pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi. Krugman (1991) dan Romer (1986) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kumulatif yang mendorong terjadinya peningkatan disparitas regional.

2.1.5 Hubungan Jumlah Penduduk Bekerja terhadap Disparitas Pembangunan

Tingkat jumlah penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk usia 0 – 15 akan memberikan peningkatan dalam jumlah angkatan kerja di masa mendatang (Todaro, 2000). Semakin tingginya kesempatan kerja suatu daerah akan menggambarkan seberapa tinggi produktivitas masyarakat daerah tersebut. Semakin tinggi angkatan kerja yang ikut serta dalam menjalani roda perekonomian/bekerja maka PDRB perkapita juga akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya angkatan kerja yang aktif bekerja. Dengan kata lain kesempatan kerja dapat menentukan naik turunnya tingkat disparitas pembangunan suatu wilayah dilihat dari tinggi rendahnya produktivitas pembangunan disuatu wilayah.

2.1.6 Hubungan Pendidikan dan Disparitas Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal:

- a) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- b) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (human capital) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004).

Pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian. (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Satria, 2008). Logika ini juga yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (human capital). Romer (1986) dan Lucas (1988) dalam Dian Satria (2008) menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam

pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan human freedom secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam millennium development goals juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.

Penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan mampu mengimbangi persaingan di era Globalisasi sangat ditentukan melalui tingkat Pendidikan. Kesalahan yang diberikan melalui pendidikan dalam berbagai macam bidang di Negara Dunia Ketiga atau Negara Berkembang tentu akan menimbulkan biaya yang lebih banyak, karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki sistem pendidikan yang telah lama berjalan. Kesalahan ini dapat dicerminkan melalui pada kurangnya tenaga ahli dalam Negara berkembang yang berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena kurang kesempatan kerja akan berarti pemborosan dan justru akan menciptakan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar antara golongan pendapatan rendah dan pendapatan tinggi. Oleh karena itu tingkat pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf. Semakin tingginya angka melek huruf akan dapat mengurangi kesenjangan dalam sebuah wilayah (Irawan dan Suparmoko, 2002). Perdana (2005) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi pada sebuah wilayah akan mampu meningkatkan kontribusi produktivitas pekerja yang seiring berjalan akan diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang berimplikasi pada PDRB perkapita yang meningkat yang akan mengurangi ketimpangan pada suatu wilayah.

2.1.7 Konsep Ketimpangan dan Kesenjangan Pembangunan

Konsep kesenjangan sendiri menimbulkan kontroversi yang sangat mengejutkan. Menurut Lane & Ersson (2002), secara implisit teori kesenjangan masyarakat mengisyaratkan adanya jurang ketimpangan kemakmuran ekonomi antara kelompok negara kaya dan miskin yang semakin memburuk sejak berakhirnya perang dunia kedua. Teori ini menegaskan bahwa melebarinya jurang ketimpangan itu berlangsung sepanjang periode pasca perang. Teori kesenjangan juga mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan antar kawasan di dunia itu kurang lebih identic dengan pemisahan geografis bola dunia menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan. Teori lainnya memprediksi lebih besarnya variasi eksternal dari pada variasi internal. Terkait dengan itu baik pada tingkat negara maupun tingkat regional, prediksi teori kesenjangan adalah selisih antara negara kaya dengan negara miskin akan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena negara sedang berkembang sangat sulit untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya karena adanya ledakan pertumbuhan penduduk secara regional dan secara nasional.

Myrdal menemukan ketimpangan antar wilayah dan antar negara karena adanya dampak balik (*backwash effects*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effects* merupakan semua perubahan yang terjadi dan sifatnya merugikan yang dibabkan ekspansi di suatu wilayah, karena sebab-sebab diluar wilayah itu. *Spread effect* merupakan implikasi yang terjadi dari momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat daerah ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya. Kedua kekuatan ini digunakan untuk menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik positif maupun negative. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran inovasi dan teknologi, sedangkan kekuatan efek balik negative biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tidak berkembang. Jadi lebih

banyaknya *backwash effect* daripada *spread effect* akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan wilayah. Interaksi antarwilayah pada system pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi ekonomi wilayah yang belum berkembang, sehingga diperlukan intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek negative yang menimbulkan ketimpangan antar wilayah (Udjianto dan Waluyo, 2000; Tumenggung, 1997).

Menurut Todaro (2000) ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan dalam kelompok sektor primer, sekunder dan tersier didunia ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Ketimpangan yang terjadi disektor primer disebabkan oleh kemampuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya berada dan masih berlanjutnya praktek pertanian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan disektor sekunder adalah terpusatnya kepemilikan asset dan modal baik secara fisik maupun finansial ditangan golongan tertentu yang memungkinkan mereka dapat semakin leluasa memainkan peranan-peranan yang lebih besar lagi dalam proses penciptaan produk nasional. Hal ini akan menjadikan sikaya cenderung semakin kaya, sementara si miskin tetap miskin.
3. Dalam sektor tersier atau biasa disebut sektor modern tingkat pendidikan sangat berperan untuk mendapat pekerjaan disektor ini. Ketimpangan pendapatan disektor modern terjadi karena adanya perbedaan tingkat upah yang diterima bagi orang yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan hanya orang yang berpenghasilan tinggi yang mampu mencapai pendidikan sampai ke jenjang tertinggi.

Ketimpangan pendapatan di setiap kelompok sektor tersebut jika tidak segera diatasi akan berdampak terhadap semakin lebarnya ketimpangan regional antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi digabungkan secara sistematis dengan tingkat pendapatan perkapita maka akan diperoleh gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Tesis Putu Yusi Pramandari (2009) yang berjudul Analisis Disparitas Pembangunan di Provinsi Bali. Tesis tersebut meneliti tentang disparitas pembangunan dihubungkan dengan jumlah penduduk bekerja, angka melek huruf, sektor pertanian dan jumlah hotel di Provinsi Bali. Penelitian tersebut menggunakan data panel dari 9 kabupaten dan kota di provinsi bali. Dengan menggunakan model analisis regresi data panel dan menggunakan variabel dalam penelitian adalah jumlah penduduk bekerja, angka melek huruf, kontribusi sektor pertanian dan jumlah hotel. Dengan hasil signifikansi dari variabel jumlah penduduk bekerja sebesar 0,0033 dan koefisien sebesar 0,922877 yang menggambarkan setiap kenaikan jumlah penduduk bekerja sebesar 1 akan meningkatkan disparitas pendapatan sebesar 0,922877. Signifikansi dari variabel angka melek huruf sebesar 0,0791 dan koefisien sebesar -0,017653 yang menggambarkan setiap peningkatan satu persen angka melek huruf akan menurunkan tingkat disparitas pembangunan di Provinsi Bali sebesar 0,017653. Signifikansi dari variabel kontribusi sektor pertanian sebesar 0,0032 dan

koefisien sebesar 0,007021 yang menggambarkan setiap peningkatan satu persen kontribusi sektor pertanian akan meningkatkan disparitas pembangunan sebesar 0,007021 persen. Signifikansi dari variabel jumlah hotel sebesar 0,0010 dengan koefisien 0,000345 yang menggambarkan setiap kenaikan 1 buah hotel akan meningkatkan disparitas pembangunan sebesar 0,000345. Diperoleh nilai signifikan dari variabel jumlah penduduk bekerja lebih kecil dari taraf nyata 5 persen ($0,0033 < 0,05$), maka H_0 ditolak, ini berarti jumlah penduduk bekerja berpengaruh positif dan nyata terhadap disparitas pembangunan di Provinsi Bali. Sedangkan pada variabel angka melek huruf nilai signifikan lebih besar dibandingkan taraf nyata 5 persen ($0,0791 > 0,05$), maka H_0 diterima. Ini berarti variabel angka melek huruf secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel disparitas pembangunan di Provinsi Bali.

2. Skripsi Ardhian Lukman Hakim (2011) yang berjudul Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Wilayah di Jawa Timur. Skripsi tersebut meneliti tentang seberapa besar tingkat disparitas dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, Mengetahui faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat disparitas dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan 2008. Dengan variabel penduduk yang bekerja, jumlah lulusan pada tingkat SMA/Setara, jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, upah minimum regional dan jumlah industri besar serta industri sedang, jumlah penanaman modal asing, jumlah penanaman modal dalam negeri, dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti variabel penduduk yang

bekerja, jumlah lulusan pada tingkat SMA/setara, jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, upah minimum regional dan jumlah industri besar dan sedang berpengaruh signifikan terhadap disparitas PDRB perkapita dan yang paling berpengaruh adalah jumlah pengangguran. Sedangkan jumlah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap disparitas PDRB perkapita.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Qoni Santoso Nugraha, Agus Dwi Wicaksono, dan Nyoman Suluh Wijaya yang berjudul *Regional Disparity Level at West Papua Province*. Penelitian ini meneliti tentang setiap daerah di Provinsi Papua Barat memiliki potensi, kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan aspek-aspek perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disparitas antara daerah satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan disparitas regional terkait dengan variabel fisik dan ekonomi. Berdasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Barat 2012-2016, terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi. Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari memiliki peran yang paling dominan terhadap daerah lain di sekitarnya, dan hal itu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan yang tidak begitu seimbang di masing-masing daerah, yang akan menyebabkan terjadinya disparitas regional. Manokwari merupakan ibu kota dari Provinsi Papua Barat dan sebagai pusat pemerintahan, sehingga kabupaten ini mendapat fasilitas yang lebih lengkap dalam kesehatan, Pendidikan, transportasi, dan lainnya jika dibandingkan dengan daerah selain Manokwari. Kota Sorong juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan Kabupaten Manokwari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat

disparitas yang terjadi di Provinsi Papua Barat berdasarkan populasi, fasilitas, infrastruktur dan perekonomian berdasarkan *Index Gini* dan *Index Williamson*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas regional yang terjadi dalam skala Provinsi adalah tingkat menengah. Pada skala Kabupaten, hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak termasuk dalam tingkat disparitas yang tinggi. Sedangkan tingkat disparitas yang rendah terdapat pada Kabupaten Fakfak, Kecamatan Kaimana, Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.

4. Tesis Jaoharul Alam (2006) yang berjudul Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi. Tesis ini meneliti tentang ketimpangan yang terjadi diantar wilayah Kabupaten Bekasi khususnya pada Bekasi bagian utara dan selatan yang tingkat disparitas lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah koridor barat dan timur. Dengan indikator melihat pada tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan IPM sebagai variabel terikat dan PDRB perkapita kecamatan, Sarana pendidikan (Jumlah SD dan MI), Rasio guru SD dan MI, Jumlah sarana kesehatan kecamatan, Rasio tenaga medis per 1000 penduduk, Kepadatan penduduk kecamatan, Akses penduduk terhadap air bersih sebagai variabel bebasnya. Dalam hasil menggunakan Indeks Williamson menunjukkan angka yang mendekati satu dan cenderung meningkat serta masih banyaknya ketimpangan antar kecamatan melalui gambaran pengujian Tipologi Klassen yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa kecamatan yang tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang secara signifikan

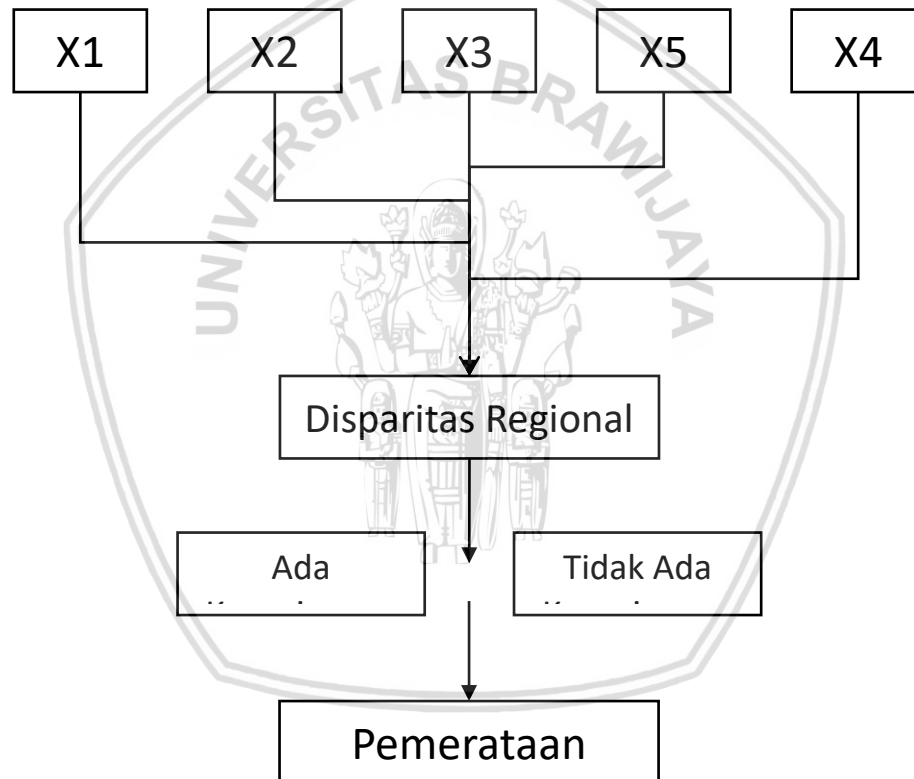
berpengaruh diantaranya PDRB, Rasio guru, kepadatan penduduk, dan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih.

5. Tesis Sri Karima Amalia (2017) yang berjudul Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Tesis ini meneliti tentang tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi dan faktor – faktor yang mempengaruhi laju konvergensi pertumbuhan ekonomi Jawa timur. Dengan menggunakan data panel dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur antara tahun 2005 – 2014. Hasil estimasi pada penelitian menunjukkan bahwa di pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bersifat konvergen pada tingkat yang rendah sehingga perlu upaya percepatan konvergensi yang dapat ditempuh melalui 5 (lima) kebijakan pembangunan, yaitu pemerataan infrastruktur dasar seperti pemerataan jumlah angkatan kerja, dan pemerataan produktivitas tenaga kerja. Pada variabel Infrastruktur jalan memiliki nilai positif sebesar (0.316869) pada taraf signifikansi sebesar 1 persen, yang mengartikan bahwa variabel ini mempercepat pertumbuhan pendapatan perkapita. Setiap penambahan 1 poin Infrastruktur jalan akan mempercepat pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 0.316869. Infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong dunia usaha melalui penurunan biaya transportasi dan produksi serta mampu mempermudah akses terhadap pasar, serta mendorong mobilitas orang, barang, maupun aktivitas ekonomi di seluruh Kawasan sehingga pertumbuhan dapat menjadi lebih inklusif (OECD 2015). Xueliang (2008) memperhatikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi menghubungkan kegiatan ekonomi berbagai daerah menjadi satu, dan karena itu memungkinkan daerah yang berkembang pesat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh lambat oleh efek difusi, sehingga menunjukkan efek spillover positif.

6. Jurnal Sasa Obradovic, Nenamja Lojanica dan Olivera Jankovic yang berjudul *The influence of economic growth on regional disparities: Empirical evidence from OECD countries*. Jurnal ini meneliti tentang pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dengan disparitas regional dengan sampel panel dari 22 negara *OECD* (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam periode waktu tahun 2000 sampai 2011. Berdasarkan analisis empiris membuktikan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas regional. Pertumbuhan ekonomi dan disparitas regional bergerak secara bersamaan ke arah yang sama dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap disparitas regional. Dengan begitu sangat penting untuk lebih meningkatkan pemerataan GDP di wilayah wilayah berkembang, melalui kebijakan yang tepat untuk pembangunan setiap wilayah dari semua tingkat pemerintahan. Karena berdasarkan pada hasil analisis dibuktikan bahwa kontribusi total GDP dari area metropolitan diatas 50% pada 22 negara *OECD* dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal in menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung dikontribusikan dari sebagian wilayah yang memiliki tingkat perekonomian baik saja dan untuk wilayah yang kurang berkembang hanya memberikan kontribusi kecil saja. Wilayah tertinggal bisa menjadi lebih baik dan kompetitif dengan wilayah lainnya jika kombinasi antara kebijakan dan koordinasi dari pemerintahan berjalan sesuai dan bersamaan dalam membangun daerah tertinggal.

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Sumber: data diolah

Keterangan :

X1 = Jumlah Angkatan Kerja pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015

X2 = Jumlah Panjang Jalan pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015

X3 = Tingkat Angka Harapan Hidup pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015

X4 = Rata – Rata Lama Sekolah pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015

X5 = Laju Pertumbuhan Ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015

Kerangka pikir adalah alur pemikiran yang berdasarkan pada gagasan penelitian yang mengacu pada pernyataan penelitian yang telah dirumuskan. Di dalam penelitian ini akan diketahui apakah masing-masing variabel yang telah dipaparkan diatas akan berpengaruh terhadap disparitas regional pada 33 Provinsi di Indonesia.

Keterangan :

a. Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja merupakan jumlah dari penduduk pada usia produktif, yaitu penduduk dalam kurun usia 15 sampai dengan 64 tahun baik yang sedang bekerja/sudah memiliki pekerjaan maupun penduduk usia produktif yang sedang mencari pekerjaan.

b. Panjang Jalan

Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota kabupaten/kota, atau antar Ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Dalam hal ini panjang jalan

yang tersedia mampu membantuk meningkatkan mobilitas kegiatan ekonomi antar kabupaten/kota maupun antar Provinsi.

c. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang mampu dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Dalam perekonomian tingkat harapan hidup akan memberikan beberapa dampak secara tidak langsung seperti semakin tingginya umur seseorang hingga melewati angka usia produktif akan memberikan dampak penurunan produktivitas.

d. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Dalam hal ini peningkatan rata-rata lama sekolah pada provinsi mampu memberikan dampak positif pada semakin tingginya ilmu pengetahuan pada tenaga kerja yang mampu mendorong semakin baiknya persaingan tenaga ahli.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah secara berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik dalam periode tertentu. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dalam wilayah dapat memberikan dampak terhadap tingkat disparitas jika terjadi hanya pada salah satu atau beberapa wilayah tertentu saja. Karena pada umumnya pertumbuhan ekonomi sebagian besar dikontribusikan oleh daerah perkotaan/metropolitan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga jumlah angkatan kerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada 33 Provinsi di Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disparitas regional.
2. Diduga panjang jalan provinsi tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada 33 Provinsi di Indonesia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap disparitas regional.
3. Diduga angka harapan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada 33 Provinsi di Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disparitas regional.
4. Diduga rata-rata lama sekolah tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada 33 Provinsi di Indonesia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap disparitas regional.
5. Diduga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada 33 Provinsi di Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disparitas regional.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Maksud dari pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan penelitian ini menekankan pada bentuk perhitungan secara formulasi serta menitik beratkan pada pengujian hipotesis.

Wilayah yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh Provinsi dalam wilayah Indonesia yang berjumlah 33 Provinsi sebagai unit analisis dan jangka waktu yang dipilih dalam penelitian ini selama 6 (enam) tahun, pada periode tahun 2010 – 2015.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat diukur dengan nilai tertentu yang berguna untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang ingin diteliti. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua buah variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah disparitas pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan periode 2010 sampai dengan 2015.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah angkatan kerja, infrastruktur jalan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan laju pertumbuhan.

Setelah menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan pendefinisian secara operasional dari variabel tersebut. Tujuannya adalah agar variabel tersebut dapat terukur dengan jelas secara matematis.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Infrastruktur jalan

Infrastruktur jalan dihitung dengan menggunakan rasio panjang jalan baik dan sedang perkapita setiap Provinsi di Indonesia.

2) Angkatan Kerja

Semua penduduk yang berusia 15 tahun keatas atau usia produktif yang aktif secara ekonomi baik mereka yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

3) Rata – Rata Lama Sekolah

Rata rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Dalam hal ini rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan pada masyarakat.

4) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang mampu dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Dalam hal ini angka harapan hidup juga menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat.

5) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan diukur melalui tingkat pertumbuhan PDRB yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif dan sumber data berdasarkan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat data panel, yaitu data yang berasal dari gabungan data deret berkala (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Penelitian ini menggunakan data panel dalam bentuk data *time series* dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan *cross section* sebanyak 33 Provinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas dan instansi lain terkait.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Estimasi Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Model regresi linier berganda merupakan model

ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi linier berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen.

Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2012) data panel memiliki dimensi ruang dan waktu, yaitu unit individu yang sama disurvei dari waktu ke waktu. Data panel merupakan data yang sangat bermanfaat karena data jenis ini membantu peneliti untuk mendalami kegiatan pelaku ekonomi tidak hanya antara individu tetapi perilaku ekonomi lintas-waktu (Ekananda, 2016). Dikarenakan penjelasan diatas penelitian ini menggunakan data panel, maka dengan begitu analisis modelnya menjadi model regresi data panel. Model regresi data panel ini memiliki 3 (tiga) pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis data, yaitu:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan ini disebut juga sebagai *pooled least square (PLS)*. Model ini secara sederhana menggunakan seluruh data *time series* dan *cross section*. Model ini mengatakan bahwa *intercept* dan *slope* dari setiap variabel dalam penelitian adalah sama untuk semua observasi. *Common Effect Model* merupakan model yang paling sederhana jika dibandingkan dengan dua model lainnya.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model memperhitungkan adanya kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables*, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dimasukkan variabel *dummy* untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai yang berbeda-beda, baik *cross section* maupun *time series*.

Penggunaan *dummy* membuat estimator model ini dikenal dengan *least square dummy variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan ini memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari *cross section* dan *time series*. Pendekatan *Random Effect Model* ini merupakan variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS).

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam rangka untuk penentuan pendekatan/model yang akan digunakan dalam penelitian terlebih dahulu dilakukan uji guna menentukan model mana dari hasil uji tersebut yang terbaik dan sesuai dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa uji yang harus dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow dilakukan untuk memilih antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM). Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan antara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM).

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan teknik pengujian *F-Statistics* yang memiliki hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS/(NT - N - K)}$$

Dimana:

RRSS : Restricted Residual Sum Square, merupakan jumlah dari *Square Residual* yang didapatkan melalui estimasi data panel dengan penggunaan metode *Pooled Least Square/Common Effect Model*.

URSS : Unrestricted Residual Sum Square, merupakan jumlah dari *Square Residual* yang didapatkan melalui estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect Model*.

Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel ataupun membandingkan nilai probabilitas F dengan tingkat signifikansi (α). Jika nilai F-hitung > F-tabel atau nilai probabilitas F < tingkat signifikansi (α) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang mengartikan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*, begitu pula sebaliknya.

Setelah itu dilakukan Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Namun, ketika H_0 diterima dalam Uji Chow tidaklah perlu dilakukan Uji Hausman dengan begitu model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

2. Uji Hausman

Untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) digunakan Uji Hausman. Hipotesa dalam Uji ini adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pedoman dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $\geq 0,05$ (α), maka H_0 diterima yang berarti model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM)
2. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$ (α), maka H_0 ditolak dengan begitu berarti model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah *random effect model* (REM) lebih baik dari *common effect model* (CEM). Uji ini kemudian dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang didasarkan pada nilai *residual* dari *common effect model* (CEM).

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Square* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis *Chi-Square* maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat untuk regresi data panel tersebut adalah *random effect model* (REM). Sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis *Chi-Square* maka H_0 diterima berarti model yang tepat digunakan untuk regresi data panel tersebut adalah *common effect model* (CEM). Dalam hal ini pengambilan keputusan bisa juga dilakukan dengan melihat nilai *probabilitu cross-section random*. Apabila nilainya berada diatas 0,05 (tingkat signifikansi), maka H_0

diterima dan apabila nilainya berada dibawah 0,05 (tingkat signifikansi), maka H_0 ditolak.

3.4.2 Model Analisis

3.4.2.1 Analisis Faktor Penyebab Disparitas

Untuk mengetahui pengaruh jumlah angkatan kerja, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, dan infrastruktur jalan terhadap disparitas pembangunan di Indonesia periode tahun 2010-2015 digunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Gujarati (1997), persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_i X_i + \mu_i \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

Dalam penelitian ini persamaannya menjadi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \mu_i \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

Y = Indeks *Williamson* Pembangunan di 33 Provinsi Seluruh Indonesia periode 2010-2015

X_1 = Jumlah angkatan kerja pada 33 Provinsi di Indonesia periode 2010-2015

X_2 = Panjang Jalan pada 33 Provinsi di Indonesia periode 2010-2015

X_3 = Angka Harapan Hidup pada 33 Provinsi di Indonesia periode 2010-2015

X_4 = Rata-Rata Lama Sekolah pada 33 Provinsi di Indonesia periode 2010-2015

X_5 = Laju Pertumbuhan PDRB pada 33 Provinsi di Indonesia periode 2010-2015

Analisis dengan Indeks *Williamson*

Untuk melakukan analisis disparitas antar regional dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indkes seperti yang digunakan oleh para ahli. Indeks tersebut adalah sebagai berikut: Indeks Williamson, Indeks Theil dan L-Indeks. Dalam penelitian ini akan menggunakan indeks atau koefisien Williamson untuk melihat tingkat disparitas di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun cara menghitung koefisien variasi Williamson (Sjahrizal, 1997) adalah sebagai berikut:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum [(Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)]}{y}} \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

IW = Indeks ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota i

Y_i = pendapatan perkapita Kabupaten/Kota ke i

Y = pendapatan perkapita rata-rata Provinsi i

f_i = jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i

n = jumlah penduduk di Provinsi i

Koefisien Variasi Williamson atau biasa disebut tingkat ketimpangan yang diperoleh melalui perhitungan berdasarkan pada jumlah PDRB, Indeks Williamson menggambarkan seberapa besar kesenjangan wilayah. Koefisien Indeks Williamson menggambarkan tingkat ketimpangan pada suatu wilayah, dimana semakin tingginya nilai Indeks Williamson pada suatu wilayah menggambarkan adanya disparitas regional yang semakin parah. Sebaliknya ketika nilai Indeks Williamson mendekati nol menggambarkan bahwa disparitas regional yang terjadi antara wilayah satu dengan yang lainnya semakin rendah.

3.5 Metode Pengujian

3.5.1 Uji Hipotesis

3.5.1.1 Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji koefisien regresi secara simultan atau bersama-sama dari variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Rumus yang digunakan dalam menghitung F hitung adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2)/n - k - 1}$$

Dimana :

R^2 = ESS/TSS = koefisien determinasi

$k-1$ = derajat bebas pembilang

$n-k$ = derajat bebas penyebut

k = variabel bebas

n = jumlah sampel

dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- a) H_0 : Variabel jumlah angkatan kerja (X1), rasio angka melek huruf (X2), rasio pengeluaran pemerintah dalam kesehatan (X3), rasio infrastruktur jalan per kapita (X4), secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan di Indonesia.

- b) H_1 : Variabel jumlah angkatan kerja (X1), rasio angka melek huruf (X2), rasio pengeluaran pemerintah dalam kesehatan (X3), rasio infrastruktur jalan per kapita (X4), secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan di Indonesia.

Pengambilan keputusan dalam Uji F adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima, apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas dari Uji F, dengan kesimpulan seperti dibawah:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak, apabila nilai probabilitas $F > \alpha$ (0,05)
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima, apabila nilai probabilitas $F \leq \alpha$ (0,05)

3.5.1.2 Uji T

Uji T biasa dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan yang digunakan untuk melihat t-hitung adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b - \beta}{Sb}$$

Keterangan:

- b = penduga regresi hasil observasi
 β = parameter yang dinyatakan dalam H_0
 Sb = standar deviasi observasi

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) $H_0 : \beta = 0$ yang menunjukkan bahwa variabel jumlah angkatan kerja (X1), panjang jalan (X2), angka harapan hidup (X3), rata-rata lama sekolah (X4), dan laju pertumbuhan PDRB (X5), secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan di Indonesia.
- b) $H_0 : \beta \neq 0$ yang menunjukkan bahwa variabel jumlah angkatan kerja (X1), panjang jalan (X2), angka harapan hidup (X3), rata-rata lama sekolah (X4), dan laju pertumbuhan PDRB (X5), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan di Indonesia.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji-t adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$

Atau dapat juga dengan melihat nilai probabilitas t berdasarkan hasil regresi:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila nilai probabilitas $t > \alpha$ (0,05)
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila nilai probabilitas $t \leq \alpha$ (0,05)

3.5.1.3 Koefisien Determinasi (Goodness of Fit)

Dengan memperoleh persamaan regresi selanjutnya diukur tingkat ketepatan/kecocokan (*goodness of fit*) dari regresi, yaitu dengan mengukur besarnya proporsi variasi perubahan variabel bebas terhadap variasi (naik turunnya) variabel terikat secara bersama-sama. Koefisien determinasi dapat memberikan informasi baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. R^2 memiliki rentang nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika $R^2 = 0$, artinya variasi

dari variabel dependen tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali oleh variabel bebas. Jika $R^2 = 1$. Artinya variasi dari variabel dependen secara keseluruhan mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Untuk menghitung nilai koefisien determinasi (R^2) menurut Gujarati (1997) adalah sebagai berikut.

$$R^2 = \frac{1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}}{1}$$

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel eror atau residual dalam model regresi terdistribusi dengan normal. Metode dalam melakukan uji normalitas adalah dengan melihat grafik p-p plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai probabilitas dari hasil uji tersebut diatas $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel eror dalam model regresi terdistribusi dengan normal, atau sebaliknya.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Istilah multikolinearitas mengacu pada Ragnar Fisch (1934). Awalnya, hal tersebut berarti keberadaan dari hubungan linear yang “sempurna”, atau tepat, diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi (Gujarati dan Porter, 2012).

Untuk itu dilakukan uji multikolinearitas untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Jika terdapat

korelasi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Dengan melihat matriks korelasi antar variabel, apabila nilai koefisien korelasi antar sesama variabel bebas lebih besar 0,8 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah multikolinearitas.
2. Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih besar dari 5.
3. Dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) dan nilai koefisien regresi parsial dari hasil Uji T. Apabila nilai R^2 cukup tinggi namun sedikit sekali nilai koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang ada pada model regresi klasik adalah factor gangguan yang muncul dalam model regresi bersifat homoskedastik, yang berarti bahwa mereka semua memiliki varians yang sama. Permasalahan heteroskedastisitas muncul apabila varians dari setiap factor gangguan memiliki angka yang tidak konstan.

Untuk menguji apakah terdapat masalah dalam sebuah model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan Uji White. Uji white berbeda dengan uji yang

lainnya karena tidak bergantung pada asumsi normalitas dan mudah untuk diimplementasikan (Gujarati, 2012). Jika nilai *chi-square* dari hasil Uji White melebihi nilai *chi-square* kritis pada tingkat signifikansi yang dipilih, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilainya tidak melebihi nilai *chi-square* kritis, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Permasalahan autokorelasi muncul ketika terdapat korelasi diantara faktor eror pada anggota seri observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (*data time series*) atau tempat (*data cross section*). Autokorelasi dapat terjadi karena observasi yang muncul sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji apakah terdapat masalah autokorelasi dalam sebuah model regresi dapat dilakukan dengan metode *Durbin-Watson Test*. Perumusan hipotesis dalam *Durbin-Watson Test* adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negative

H_1 : Terdapat autokorelasi baik positif maupun negative

Pengambilan keputusan dari *Durbin-Watson Test* didapatkan dengan membandingkan nilai dari hasil *Durbin-Watson Test* dengan batas bawah d_L dan batas atas d_U dari statistic d *Durbin-Watson*. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

$0 < d < d_L$: H_0 ditolak, ada autokorelasi positif

$d_L \leq d \leq d_U$: tidak ada keputusan

$4 - d_L < d < 4$: H_0 ditolak, ada autokorelasi negatif

$4 - d_L \leq d \leq 4 - d_L$: Tidak ada keputusan

$d_L < d < 4 - d_u$: H_0 diterima, tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif

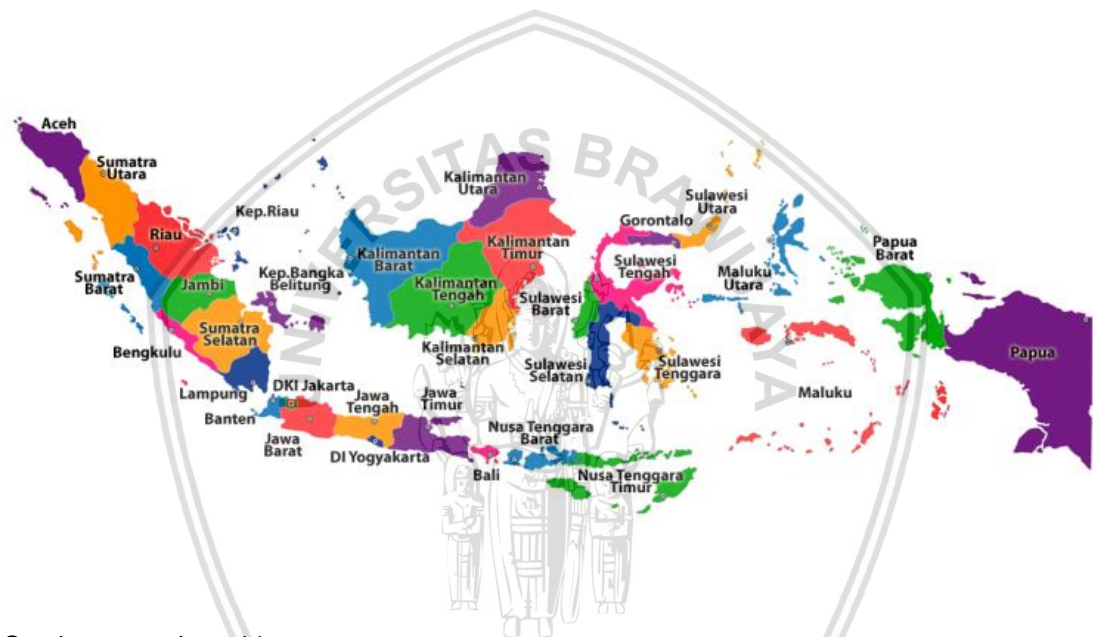


BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Gambar 4.1 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia



Sumber : google.co.id

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan kepemilikan pulau dengan jumlah 17.504, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia bila dilihat secara astronomis terletak pada 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT April hingga September dan musim hujan pada Oktober hingga Maret serta rata-rata suhu harian antara 26-36 derajat Celcius. Dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 261.890.900 Indonesia menduduki

peringkat ke empat negara dengan jumlah penduduk terbanyak dengan pembagian wilayah menjadi 34 provinsi. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara memiliki wilayah alam yang mendukung keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Selain itu Indonesia memiliki nilai terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; serta
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan perekonomian yang cukup cepat, dimana Indonesia saat ini telah masuk daftar 20 negara dengan ekonomi terbesar didunia atau yang dikenal dengan G20 serta meraih status *investment grade* untuk pertama kalinya setelah mengalami krisis pada 20 tahun lalu. (Sri Mulyani, 2018). Selain itu keberagaman kekayaan yang dimiliki Indonesia juga mendorong tingkat kemampuan bersaing dengan negara berkembang lainnya dalam perekonomian. Dilihat dari tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk dalam negara berkembang cukup pesat jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,6 persen selama 8 tahun terakhir. Berdasarkan pada data PDB menyatakan bahwa perekonomian Indonesia secara dominan di dorong oleh sektor industry pengolahan dengan kontribusi mencapai 21,08% diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran

sebagai sektor dominan kedua dengan kontribusi hingga 13,43% dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor dengan kontribusi terkecil yang hanya sebesar 0,07% (Badan Pusat Statistik, 2017).

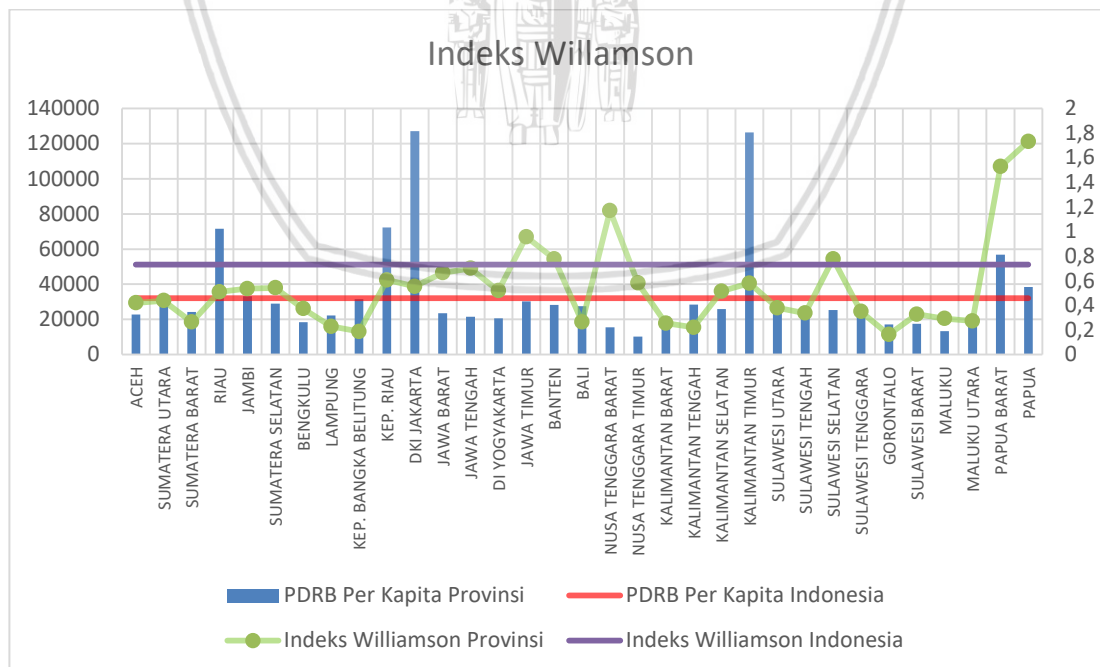
4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian merupakan penjelasan dan penggambaran tentang karakteristik dari variabel yang digunakan dalam penelitian.

4.2.1. Indeks Williamson

Indeks Wiliamson merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur suatu tingkat kesenjangan antarwilayah/daerah dengan menggunakan PDRB per kapita dan jumlah penduduk sebagai perhitungan dasarnya (Badan Pusat Statistik)

Gambar 4.2 Rata – Rata Indeks Williamson 33 Provinsi 2010 – 2015

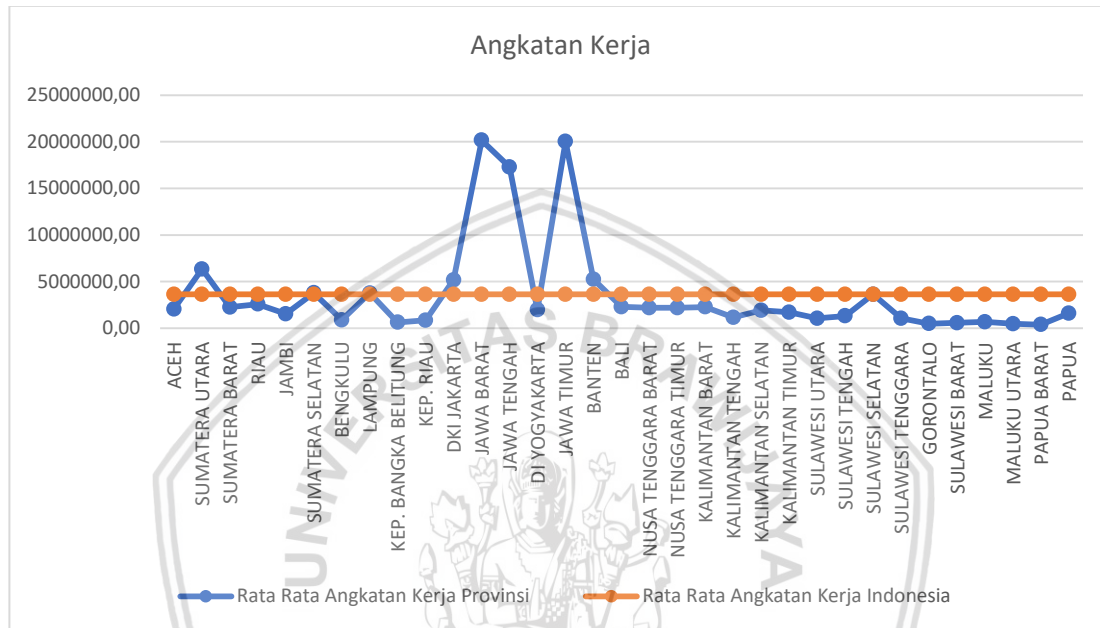


Sumber : Badan Pusat Statistik 2017, data diolah

Berdasarkan pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan Indeks Williamson antara provinsi terlihat dengan jelas, dengan dasar perhitungan PDRB Perkapita dapat kita lihat diatas bahwa tinggi rendahnya PDRB Per Kapita tidak lah menggambarkan secara langsung tingkat Indeks Williamson masing masing provinsi. DKI Jakarta sebagai pemegang predikat PDRB Per Kapita tertinggi dengan nilai mencapai 127.071 ribu rupiah, tingkat ketimpangannya berdasarkan Indeks Williamson berada pada 0,554 dan bukan merupakan Provinsi yang merasakan ketimpangan tertinggi ataupun terendah. Nusa Tenggara Barat memiliki PDRB Per Kapita terendah dengan nilai sebesar 10210 ribu rupiah lebih kecil dari PDRB Per Kapita Indonesia dengan tingkat ketimpangan yang tidak berbeda jauh dengan ketimpangan yang terjadi di DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan PDRB Per Kapita tertinggi yaitu sebesar 0,58. Sedangkan Papua yang memiliki PDRB Per Kapita sebesar 38.460 ribu rupiah yang lebih tinggi dibandingkan PDRB Per Kapita Indonesia yang sebesar 32.146 ribu rupiah memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 1.731 berdasarkan pada nilai Indeks Williamson. Berdasarkan pada grafik diatas menggambarkan bahwa pada Papua Barat dan Papua memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sebesar 0,73 meskipun pada kedua provinsi tersebut memiliki PDRB Per Kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan pada Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo yang memiliki PDRB Per Kapita yang lebih kecil dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang jauh dibawah tingkat ketimpangan Indonesia sendiri dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,162 untuk Gorontalo serta 0,187 untuk Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.2. Angkatan Kerja

Gambar 4.3 Angkatan Kerja Rata-Rata 33 Provinsi di Indonesia 2010-2015



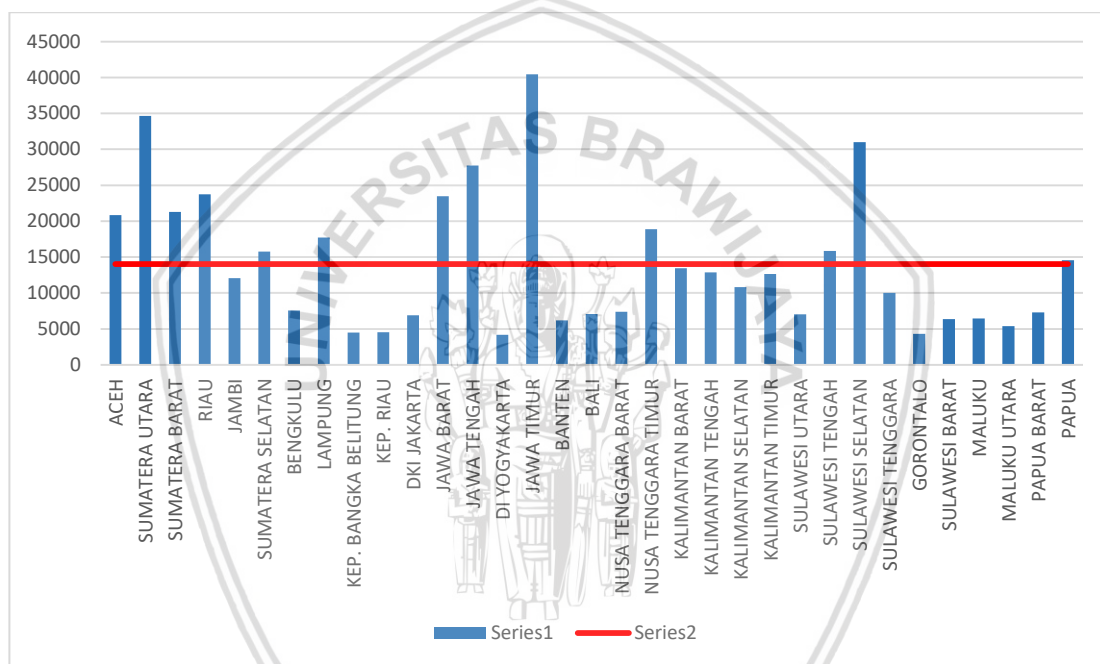
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, data diolah

Angkatan kerja merupakan penduduk berusia kerja dengan umur 15 tahun dan lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara dan pengangguran tertubka yang sedang mencari pekerjaan (Sirusa Badan Pusat Statistik). Berdasarkan pada grafik 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata angkatan kerja di Indonesia pada 33 provinsi pada periode 2010-2015 adalah sejumlah 3619276,985 jiwa. Provinsi yang memiliki predikat angkatan kerja terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 20152647 jiwa. Jumlah angkatan kerja tertinggi pada provinsi sangatlah berbeda jauh dengan jumlah angkatan kerja pada provinsi yang terendah, yaitu papua barat dengan jumlah rata-rata angkatan kerja hanya sebesar 375588. Berdasarkan pada grafik diatas sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki rata-rata angkatan kerja jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan

rata-rata angkatan kerja Nasional dan hanya terdapat 7 provinsi yang memiliki rata-rata diatas tingkat nasional. Diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai Provinsi yang memiliki jumlah angkatan kerja tiga tertinggi.

4.2.3. Infrastruktur Jalan

Gambar 4.4 Rata-Rata Panjang Jalan 33 Provinsi 2010-2015



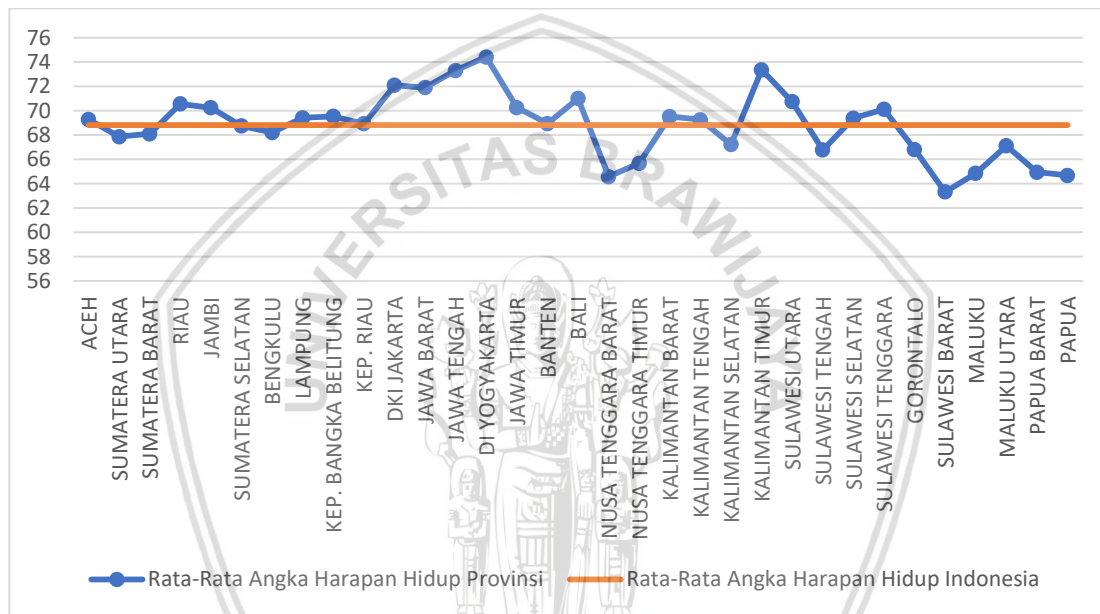
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi (Sirusa Badan Pusat Statistik, 2017). Berdasarkan pada grafik diatas menggambarkan bahwa pada 33 Provinsi di Indonesia memiliki rata-rata panjang jalan 14031,247 km. Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki rata-rata panjang jalan tertinggi dalam periode 2010-2015, dengan panjang jalan mencapai 40439 km. Sedangkan Provinsi D.I

Yogyakarta memiliki rata-rata panjang jalan terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya dengan rata-rata panjang jalan 4164,83 km.

4.2.4. Angka Harapan Hidup

Gambar 4.5 Rata-Rata Angka Harapan Hidup 33 Provinsi 2010-2015



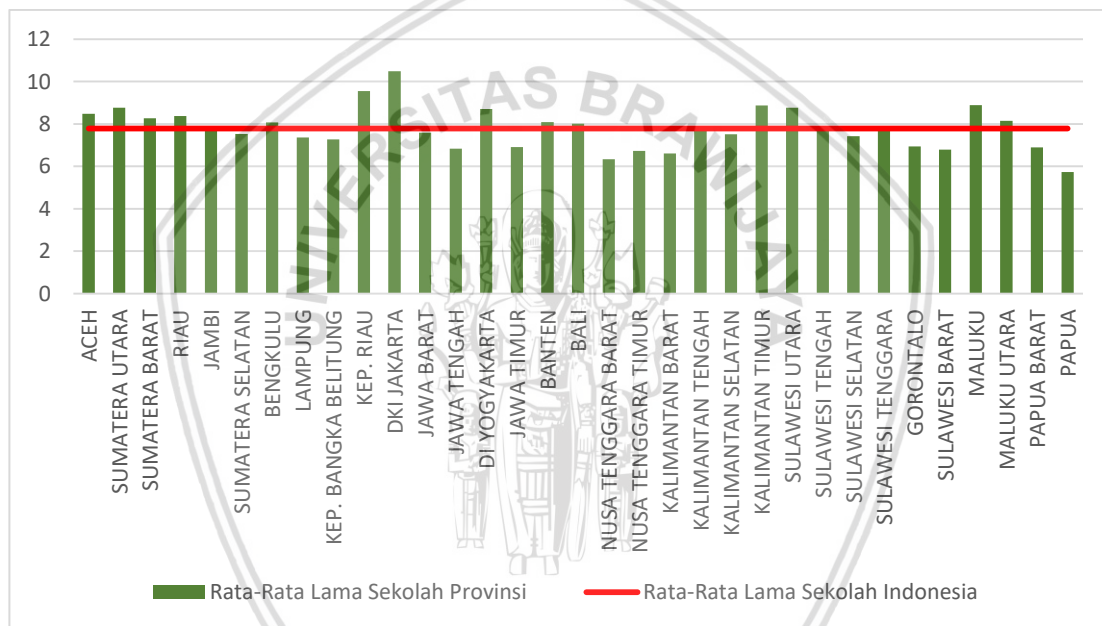
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (Sirusa Badan Pusat Statistik, 2017). Pada sisi lain Angka Harapan Hidup juga digunakan sebagai alat dalam evaluasi kinerja pemerintahan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan derajat kesehatan. Berdasarkan pada grafik diatas rata-rata angka harapan hidup di 33 Provinsi di Indonesia adalah 68,81 tahun dan D.I Yogyakarta merupakan Provinsi yang memiliki tingkat harapan hidup

tertinggi dibandingkan dengan 32 Provinsi lainnya, yaitu dengan angka harapan hidup selama 74,4 tahun. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang memiliki angka harapan hidup terendah yaitu hanya selam 63.31 tahun.

4.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah

Gambar 4.6 Rata-Rata Lama Sekolah 33 Provinsi 2010-2015



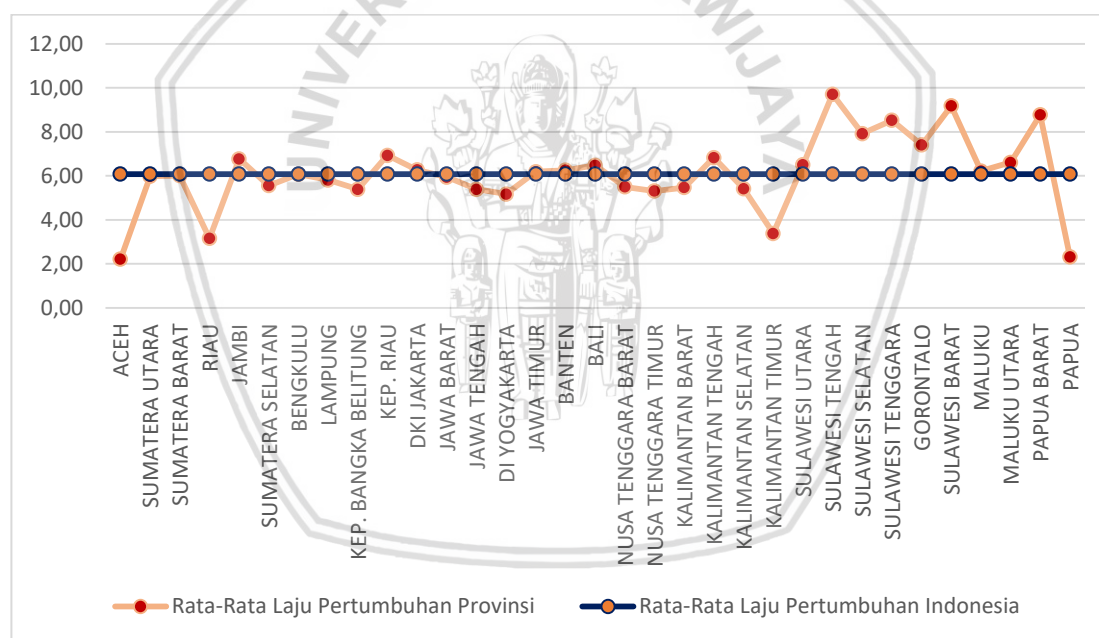
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Rata-rata Lama Sekolah(MYS) merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Dalam perhitungannya membutuhkan beberapa informasi diantaranya partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan, ijazah tertinggi, dan tingkat tertinggi yang pernah diduduki (Badan Pusat Statistik, 2017). Angka rata-rata lama sekolah berguna untuk menggambarkan seberapa jauh jenjang pendidikan yang pernah diduduki oleh seseorang, dalam grafik diatas

menggambarkan secara umum dalam Provinsi. DKI Jakarta sebagai ibukota memiliki tingkat rata-rata lama sekolah tertinggi yang pada umumnya jumlah tahun seseorang menempuh pendidikan di DKI Jakarta adalah selama 10,48 tahun. Sedangkan papua merupakan Provinsi yang memiliki tingkat rata-rata lama sekolah terendah diantara 32 provinsi lainnya, dengan rata rata hanya selama 5,73 tahun cukup jauh dari rata rata nasional yang selama 7,78 tahun.

4.2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 4.7 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Laju pertumbuhan PDRB merupakan nilai yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah/regional perekonomian dalam selang waktu tertentu. Selain itu laju pertumbuhan PDRB juga memiliki fungsi sebagai nilai untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional, sebagai dasar perkiraan/proyeksi penerimaan untuk perencanaan pembangunan nasional

maupun regional, dan sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis (Badan Pusat Statistik, 2017). Rata-rat laju pertumbuhan tertinggi pada 33 Provinsi adalah sebesar 9,71 persen yang diduduki oleh Sulawesi Tengah, jauh diatas rata-rata laju pertumbuhan secara nasional yang hanya sebesar 6,08 persen. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan terendah senilai 2,22 persen selama periode 2010 sampai 2015 terdapat di provinsi Aceh hamper 4 persen dibawah rata-rata laju pertumbuhan nasional.

4.3. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis dalam bentuk regresi data panel, data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dalam data panel terdapat tiga model dalam regresi, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Sebelum dilakukan regresi data panel harus dilakukan terlebih dulu uji untuk menentukan model mana yang digunakan. Pertama uji Chow untuk menentukan model *Common* atau *Fixed*, lalu uji Hausman untuk menentukan model *Fixed* atau *Random*, dan yang terakhir uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model *Random* atau *Common*. Berdasarkan data panel dalam penelitian ditemukan hasil sebagai berikut:

4.3.1. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang dilakukan dalam tujuan menentukan model mana yang lebih baik antara *Common Effect* atau *Fixed Effect* (Widarjono, 2007). Adapun hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut :

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika Probabilitas F lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu 5%(0,05).

Dengan menggunakan EViews 10, hasil uji chow yang di temukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	105.287648	(32,160)	0.0000
Cross-section Chi-square	612.543496	32	0.0000

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Berdasarkan pada hasil uji Chow diatas menunjukkan bahwa Cross-section F memiliki probabilitas senilai 0,0000 dimana nilai probabilitasnya kurang dari alpha (0,05). Melihat hal tersebut maka kesimpulan sementara adalah pengujian yang digunakan adalah dengan menggunakan model *Fixed Effect* karena H_0 ditolak. Selanjutnya akan dilakukan uji Hausman untuk menentukan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

4.3.2. Uji Hausman

Setelah melakukan uji Chow dengan hasil model yang terpilih adalah *Fixed Effect*, maka selanjutnya akan dilakukan uji Hausman untuk menentukan model mana yang akan digunakan *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Uji Hausman sendiri memiliki fungsi untuk membandingkan model mana yang terbaik untuk digunakan dalam regresi data panel antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* (Gujarati, 2006). Uji Hausman memiliki hipotesis sebagai berikut :

H_0 = Model *Random Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

Jika nilai Probabilitas Chi-Square kurang dari alpha (0,05), maka H_0 ditolak yang berarti model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Sedangkan jika nilai Probabilitas Chi-Square lebih dari atau sama dengan alpha (0,05) maka H_0 diterima dan model yang terpilih adalah *Random Effect*.

Dengan menggunakan EViews 10 hasil uji Hausman terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.894818	5	0.1133

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari hasil pengujian diatas menghasilkan nilai Probabilitas $0.1133 > 0,05$. Maka kesimpulan yang diambil adalah H_0 diterima dan model yang terpilih dalam uji Hausman ada *Random Effect*. Dikarenakan hasil dari uji Chow sebelumnya *Fixed*

Effect dan uji Hausman adalah *Random Effect* perlu dilakukan uji *Langrange Multiplier* untuk menentukan model mana yang terbaik digunakan dalam penelitian antara *Random Effect* atau *Common Effect*.

4.3.3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Setelah dilakukan uji Chow dengan hasil terbaik adalah model *Fixed Effect*, maka selanjutnya dilakukan uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Hausman hasil yang didapatkan adalah model *Random Effect* yang terbaik. Maka selanjutnya harus dilakukan uji LM dengan tujuan untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Random Effect* atau *Common Effect*. Dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{Common Effect}$

$H_1 = \text{Random Effect}$

Dengan menggunakan metode *Breusch Pagan*, jika nilai probabilitas *Breusch Pagan* kurang dari nilai alpha (0,05) maka H_0 ditolak dan model yang terpilih adalah *Random Effect*. Namun ketika nilai probabilitas *Breusch Pagan* lebih besar dari alpha (0,05) maka H_0 diterima dan model yang terpilih adalah *Common Effect*.

Dengan menggunakan EViews 10 uji LM yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	412.2208 (0.0000)	2.693731 (0.1007)	414.9146 (0.0000)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan senilai 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05. Maka berdasarkan hasil tersebut kesimpulannya adalah H_0 ditolak yang berarti model terbaik yang terpilih untuk penelitian ini adalah *Random Effect*.

4.3.4. Pengujian Hasil Analisis Regresi

Dalam tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat disparitas pada 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2015 yang diukur dengan Indeks Williamson. Maka perlu dilakukan pengujian analisis regresi data panel tanpa uji asumsi klasik, karena menggunakan model estimasi *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model estimasi *Random Effect Model* berdasarkan pada hasil uji chow, uji hausman, dan lagrange multiplier.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Angkatan Kerja	0,266164	0,0251
Panjang Jalan	-0,166596	0,2151
Angka Harapan Hidup	0,176671	0,9425
Rata-Rata Lama Sekolah	-0,164032	0,0206
Pertumbuhan Ekonomi	0,062342	0,0168
Konstanta	-2664691	0,7754
R-Squared	0,116700	
Adjusted R-Squared	0,093698	
F-Statistic	5,073348	
Prob(F-Statistic)	0,000216	

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IW = -2664 + 0,2661 X_1 - 0,1665 X_2 + 0,1766 X_3 - 0,1640 X_4 + 0,0623 X_5$$

Dimana:

IW = Nilai Indeks Williamson (Disparitas)

X_1 = Angkatan Kerja

X_2 = Panjang Jalan

X_3 = Angka Harapan Hidup

X_4 = Rata-Rata Lama Sekolah

X_5 = Laju Pertumbuhan

Berdasarkan pada hasil pengujian dengan 1 variabel dependen dengan 5 variabel independent menunjukkan bahwa secara simultan kelima variabel independent tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan hasil : Nilai F-Statistic sebesar 5,0733 dengan nilai Probabilitas F sebesar 0,0002. Berdasarkan tabel statistic F diperoleh F_{tabel} sebesar 2,26. Karena F-Statistic $> F_{\text{tabel}}$ dan Probabilitas $< 5\%$ hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel Angkatan Kerja, Panjang Jalan, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Laju Pertumbuhan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Williamson (Disparitas) pada 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2015.

Secara parsial masing masing variabel independent terdapat 3 variabel yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat disparitas dari 5 variabel independen yang di teliti. Angkatan Kerja dengan nilai probabilitas 0,0251 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha (5%) menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Williamson (disparitas). Variabel Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan hasil regresi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0206 jauh lebih kecil dari nilai alpha (5%) menunjukkan bahwa secara parsial Rata-Rata Lama Sekolah memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Williamson (Disparitas) pada 33 Provinsi di Indonesia. Laju Pertumbuhan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Williamson (Disparitas) pada 33 Provinsi di Indonesia berdasarkan dari hasil regresi dengan nilai probabilitas 0,0168 lebih kecil di bandingkan dengan alpha (5%). Sedangkan untuk variabel Panjang Jalan dan Angka Harapan Hidup secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Indeks Williamson (Disparitas) pada 33 Provinsi di Indonesia dengan nilai probabilitas berdasarkan hasil uji jauh lebih besar dari alpha (5%), yaitu 0,2151 untuk nilai probabilitas variabel Panjang Jalan dan 0,9425 untuk nilai probabilitas Angka Harapan Hidup.

4.3.4.1. Angkatan Kerja

Berdasarkan pada hasil regresi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0251. Nilai tersebut lebih kecil dari derajat kepercayaan alpha 5%, maka variabel angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan (probabilitas $< \alpha$). Dengan nilai koefisien sebesar 0,266164 dapat diinterpretasikan bahwa variabel angkatan kerja memberikan

pengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat disparitas pada 33 Provinsi di Indonesia. Nilai koefisien yang positif menggambarkan hubungan yang sejalan antara variabel angkatan kerja dengan tingkat disparitas secara regional. Berarti setiap ada kenaikan angkatan kerja sebesar 1 persen akan memberikan dampak peningkatan tingkat disparitas sebesar 0,266164, begitupun sebaliknya.

Adanya hubungan positif antara angkatan kerja dengan tingkat disparitas regional yang diukur dengan Indeks Williamson disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angkatan kerja pada 33 Provinsi di Indonesia yang tidak secara serempak, atau secara individu provinsi saja. Yang berarti ketika pada salah satu atau beberapa Provinsi mengalami peningkatan pada jumlah angkatan kerja keseluruhan namun tidak dengan provinsi lainnya hal tersebut akan mendorong tingkat disparitas regional semakin meninggi karena adanya ketidakmerataan dalam peningkatan jumlah angkatan kerja. Selisih jumlah angkatan kerja antara satu provinsi dengan yang lainnya memberikan gambaran secara jelas sebagai alasan tingkat angkatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat disparitas secara regional. Selain itu perbedaan tingkat penyerapan tenaga kerja di masing-masing provinsi juga memberikan implikasi terhadap tingkat disparitas yang terus meningkat. Dengan kurangnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja di dalam wilayah regional satu dengan wilayah regional yang mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dibarengi dengan adanya peningkatan ketersediaan kesempatan kerja akan memberikan dampak terhadap tingkat PDRB yang berujung pada disparitas secara regional antara Provinsi. Karena peningkatan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja

tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan output dalam hal ini PDRB, yang berujung pada meningkatnya tingkat disparitas.

Tabel 4.5 Pengkelasan Rata-Rata Angkatan Kerja 33 Provinsi 2010-2015

Diatas Rata-Rata	Dibawah Rata-Rata
Sumatera Utara	Papua
Lampung	Aceh
DKI Jakarta	Sumatera Barat
Jawa Barat	Riau
Jawa Timur	Bengkulu
Jawa Tengah	Papua Barat
Banten	Maluku
Sulawesi Selatan	Maluku Utara
Sumatera Selatan	Sulawesi Barat
	Sulawesi Tengah
	Sulawesi Tenggara
	Sulawesi Utara
	Gorontalo
	Kepulauan Bangka Belitung
	Kepulauan Riau
	Bali
	D.I Yogyakarta
	Nusa Tenggara Timur
	Nusa Tenggara Barat
	Kalimantan Barat
	Kalimantan Tengah
	Kalimantan Selatan
	Kalimantan Timur
	Jambi

Sumber : Data Penelitian diolah, 2018

Tabel 4.5 menggambarkan pengkelasan 2 kelas provinsi yang memiliki rata-rata angkatan kerja diatas rata-rata angkatan kerja 33 Provinsi di Indonesia, dan yang memiliki rata-rata angkatan kerja dibawah rata-rata angkatan kerja 33 Provinsi di Indonesia. Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan merupakan 9 Provinsi yang memiliki tingkat rata-rata angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angkatan kerja 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan ke 24 Provinsi sisanya memiliki rata-rata angkatan kerja yang dibawah rata-rata, dengan begitu haruslah diseimbangkan pemerataan jumlah angkatan kerja berdasarkan luas wilayah masing masing provinsi yang dibarengi dengan adanya peningkatan ketersediaan lapangan kerja, sehingga mampu mencapai tingkat pemerataan yang baik bagi masing-masing 33 Provinsi di Indonesia.

4.3.4.2. Panjang Jalan

Berdasarkan pada hasil regresi pada data panel ditemukan bahwa variabel panjang jalan memiliki nilai probabilitas 0,2151 dengan nilai koefisien -0,166596. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tingkat derajat kepercayaan ($0,2151 > 0,05$). Lebih besarnya nilai probabilitas dari tingkat derajat kepercayaan mengartikan bahwa variabel panjang jalan memberikan pengaruh terhadap tingkat disparitas regional namun tidak secara signifikan, dan pengaruhnya dalam posisi negatif atau berkebalikan. Ketika terjadi peningkatan panjang jalan memberi dampak secara tidak langsung terhadap penurunan tingkat disparitas regional. Selain itu variabel panjang jalan tidak berpengaruh secara signifikan bisa disebabkan karena penambahan panjang jalan provinsi setiap

tahunnya tidaklah cukup besar dan pembangunannya dalam sarana transportasi belum optimal sehingga bukan menjadi salah satu yang mendorong peningkatan PDRB Per Kapita secara langsung.

4.3.4.3. Angka Harapan Hidup

Berdasarkan pada tabel 4.4 yang menjelaskan hasil regresi dari data panel penelitian ini menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,176671 dan probabilitas senilai 0,9425. Dari nilai probabilitas tersebut menjelaskan bahwa variabel angka harapan hidup memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat derajat kepercayaan ($0,9425 > 0,05$), berarti secara parsial variabel angka harapan hidup tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat disparitas regional yang terjadi pada 33 Provinsi di Indonesia. Selain itu berkaca pada nilai koefisien dari hasil regresi variabel angka harapan hidup sebesar 0,176671 menunjukkan bahwa variabel ini memberikan pengaruh secara positif terhadap tingkat disparitas regional, ketika terjadi peningkatan angka harapan hidup secara perwilayah pada 33 Provinsi di Indonesia akan memberikan dampak semakin tertinggalnya wilayah lain yang tidak mengalami peningkatan sarana kesehatan dalam hal meningkatkan angka harapan hidup. Sehingga memicu terjadinya peningkatan disparitas secara regional yang disebabkan oleh adanya ketidak merataan angka harapan hidup.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tjiptoherijanto (1995: 17 – 18) menyatakan bahwa secara umum peningkatan angka harapan hidup memiliki hubungan erat dengan tingkat produktivitas penduduk. Dengan meningkatnya

tingkat kesehatan melalui pencapaian angka harapan hidup yang tinggi akan memperpanjang masa kerja serta berimplikasi pada peningkatan output. Sehingga terjadinya peningkatan angka harapan hidup meningkat pada salah satu wilayah provinsi akan memberikan dampak peningkatan disparitas regional secara tidak signifikan. Selain itu Wongdesmiwati (2009) menyatakan bahwa angka harapan hidup yang tinggi akan memberikan dampak terhadap jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.

4.3.4.4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat disparitas regional pada 33 Provinsi di Indonesia. Hal tersebut tergambarkan melalui hasil yang didapatkan dari regresi data panel, dengan nilai probabilitas sebesar 0,026 dan koefisien sebesar - 0,164032. Dimana nilai probabilitas untuk variabel rata-rata lama sekolah lebih kecil dari tingkat derajat kepercayaan ($0,026 < 0,05$) yang menggambarkan variabel tersebut memberikan pengaruh secara signifikan. Dengan adanya nilai koefisien yang negatif menjelaskan bahwa setiap adanya kenaikan pada rata-rata lama sekolah sebesar 1 persen akan memberikan dampak penurunan pada tingkat disparitas regional pada 33 Provinsi di Indonesia sebesar 0,164032 begitupun sebaliknya ketika terjadi penurunan pada rata-rata lama sekolah.

Pengaruh negatif dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat disparitas regional disebabkan semakin tingginya rata-rata lama sekolah akan meningkatkan tingkat pendidikan dalam masyarakat. Peningkatan pendidikan ini akan mampu memberikan dorongan terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja kearah yang lebih baik sehingga mampu mendorong PDRB Per Kapita menjadi lebih tinggi. Meskipun

peningkatan rata-rata lama sekolah ini terjadi hanya pada beberapa regional saja tetapi akan memberikan dampak *Spread Effect* melalui penyebaran inovasi dan teknologi serta ilmu pengetahuan yang didapat dari momentum peningkatan pembangunan dalam pendidikan dengan begitu peningkatan pembangunan melalui pendidikan tidak hanya dirasakan oleh wilayah tersebut saja namun juga akan memberikan dampak yang baik terhadap daerah sekitarnya.

Rata – rata lama sekolah yang meningkat akan memberikan dampak terhadap kualitas tenaga kerja pada suatu wilayah. Dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja akan memberikan dampak baik terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut mampu memberikan dampak *spread effect* untuk mendorong wilayah wilayah lainnya melalui penyebaran ilmu pengetahuan dalam tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Hasil ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Todaro (2000) bahwa lamanya jangka waktu untuk menempuh pendidikan menjadi salah satu faktor yang krusial dalam mempengaruhi jumlah penerimaan. Salah satu alat pengukuran dalam hal tingkat pendidikan dalam suatu wilayah adalah rata-rata dari lamanya waktu tempuh pendidikan, dengan meningkatnya peningkatan waktu tempuh pendidikan dapat ditunjukkan dalam bentuk modal manusia.

Tabel 4.6 Pengkelasan Provinsi Berdasarkan RRLS 2010-2015

Diatas Rata-Rata	Dibawah Rata-Rata
ACEH	JAMBI
SUMATERA UTARA	SUMATERA SELATAN
SUMATERA BARAT	LAMPUNG
RIAU	KEP. BANGKA BELITUNG

Diatas Rata-Rata	Dibawah Rata-Rata
BENGKULU	JAWA BARAT
KEP. RIAU	JAWA TENGAH
DKI JAKARTA	JAWA TIMUR
DI YOGYAKARTA	NUSA TENGGARA BARAT
BANTEN	NUSA TENGGARA TIMUR
BALI	KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI UTARA	KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA	GORONTALO
MALUKU	SULAWESI BARAT
MALUKU UTARA	PAPUA BARAT
	PAPUA
	INDONESIA

Sumber: Data BPS diolah, 2018

Dalam tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara memiliki tingkat rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah pada 33 Provinsi di Indonesia pada selama tahun 2010-2015. Sedangkan 18 Provinsi lainnya memiliki rata-rata lama sekolah dibawah rata-rata lama sekolah pada 33 Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2015. Dalam rangka menekan tingkat disparitas regional maka perlu dilakukan pemerataan sarana pendidikan pada 33 Provinsi di Indonesia agar semakin meratanya tingkat rata-rata lama sekolah pada setiap provinsi, sehingga

terciptanya pendidikan yang rata untuk setiap provinsi yang akan berimplikasi pada semakin menurunnya tingkat disparitas regional.

4.3.4.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui tingkat PDRB dalam penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan dan positif. Hal ini tergambarkan dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0168 dan nilai koefisiennya senilai 0,062342.

Laju pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat disparitas regional secara positif. Dimana ketika terjadi peningkatan 1 persen laju pertumbuhan akan meningkatkan disparitas regional sebesar 0,0168. Laju pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap disparitas regional dikarenakan ketika terjadi peningkatan laju pertumbuhan pada satu atau beberapa Provinsi akan memberikan dampak semakin tertinggalnya Provinsi yang tidak mengalami peningkatan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Karena setiap laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidaklah terjadi secara serempak pada 33 Provinsi di Indonesia. Hal tersebut bahwa contributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah provinsi saja, sehingga terdapat kesenjangan antara provinsi satu dengan lainnya. Maka dari itu diperlukannya pembangunan ekonomi secara merata dan adil untuk 33 Provinsi di Indonesia agar tingkat disparitas secara regional dapat dikurangi.

Tabel 4.7 Pengkelasan Provinsi Berdasarkan Rata-Rata Laju Pertumbuhan**Ekonomi Tahun 2010-2015**

Diatas Rata-Rata	Dibawah Rata-Rata
JAMBI	ACEH
KEP. RIAU	SUMATERA UTARA
JAWA TIMUR	SUMATERA BARAT
BALI	RIAU
KALIMANTAN TENGAH	SUMATERA SELATAN
SULAWESI UTARA	BENGKULU
SULAWESI TENGAH	LAMPUNG
SULAWESI SELATAN	KEP. BANGKA BELITUNG
SULAWESI TENGGARA	DKI JAKARTA
GORONTALO	JAWA BARAT
SULAWESI BARAT	JAWA TENGAH
MALUKU	DI YOGYAKARTA
MALUKU UTARA	BANTEN
PAPUA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
	NUSA TENGGARA TIMUR
	KALIMANTAN BARAT
	KALIMANTAN SELATAN
	KALIMANTAN TIMUR
	PAPUA

Sumber : Data BPS, Diolah 2018

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat merupakan Provinsi-provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2015. Sedangkan untuk ke 19 Provinsi lainnya masih memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia.

Daerah yang berkembang dapat menjadi kompetitif ketika kombinasi antara kebijakan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam terorganisasi dengan tepat, sehingga bersinergi dengan baik dalam tujuan mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat disparitas antara 33 Provinsi di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel yang mewakili 33 Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015. Beberapa kesimpulan sementara yang dapat diperoleh melalui penelitian ini diantara lainnya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada hasil perhitungan tingkat kesenjangan antara wilayah dengan nilai Indeks Williamson pada 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 menggambarkan bahwa tingkat kesenjangan rata-rata antar provinsi pada 2010 – 2015 masih cukup mengalami ketimpangan yang cukup besar. Namun jika berdasarkan pada masing masing provinsi tergambarkan bahwa ketimpangan yang terjadi pada provinsi cenderung menurun setiap tahunnya.
2. Berdasarkan pada hasil regresi data panel, terdapat tiga variabel yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antar 33 Provinsi di Indonesia secara signifikan, yaitu :
 - a. Dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja cenderung akan mendorong semakin meningkatnya ketimpangan regional antara Provinsi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kenaikan angkatan kerja tidaklah selamanya meningkatkan produktivitas serta tidak dibarenginya dengan

peningkatan lapangan pekerjaan yang berujung pada meningkatnya pengangguran. Selain itu peningkatan angkatan kerja yang baik juga akan memberikan dorongan percepatan pertumbuhan salah satu provinsi tanpa diikuti provinsi lainnya.

- b. Tingkat jumlah panjang jalan pada 33 provinsi di Indonesia tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perubahan tingkat disparitas regional.
- c. Angka harapan hidup pada 33 provinsi di Indonesia tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perubahan tingkat disparitas regional.
- d. Peningkatan rata-rata lama sekolah akan menurunkan tingkat disparitas yang terjadi. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan pada masyarakat dan akan memberikan dampak penyebaran ilmu pengetahuan *spread effect* secara tidak langsung.
- e. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada provinsi tertentu cenderung akan mendorong terjadinya peningkatan tingkat disparitas di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketika salah satu provinsi di Indonesia mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan provinsi lainnya sehingga akan menyebabkan ketertinggalan terhadap provinsi yang tidak mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya pembuat kebijakan ekonomi harus lebih mengarah terhadap peningkatan produk domestik regional bruto provinsi yang tertinggal, guna mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemerataan penyerapan tenaga kerja (lapangan pekerjaan) serta diikuti dengan pelatihan keahlian dalam menyambut dunia persaingan antara tenaga kerja pada masing masing provinsi perlu ditingkatkan sesuai porsi jumlah angkatan kerja yang cenderung terus meningkat demi mendorong produktivitas masing-masing provinsi.
2. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi lebih diperhatikan terutama pada daerah-daerah tertinggal guna mendorong mobilitas perekonomian antar daerah.
3. Pemerataan infrastruktur dan pelayanan kesehatan pada 33 provinsi di Indonesia guna meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat untuk mencapai angka harapan hidup yang lebih baik.
4. Diharapkan bahwa pemerataan pendidikan lebih diperhatikan guna meningkatkan rata-rata lama sekolah sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap keahlian masyarakat. Terutama pada daerah-daerah yang cenderung tingkat pendidikannya rendah.
5. Memberikan kemudahan untuk seluruh daerah dalam meningkatkan kegiatan perekonomiannya melalui penyediaan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang mendorong produktivitas perekonomian sehingga mampu untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masing masing daerah. Terutama lebih difokuskan pada wilayah wilayah yang kontribusi terhadap perekonomiannya kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alois, Kutscherauer. 2010. Reginal Disparities in Regional Development of The Czech Republic – Their Occurance, Identification and Elimination. Technival University of Ostrava. WD-55-07-1.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN: Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Statistik Indonesia. (<https://bps.go.id>). Diakses pada Januari 2018.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Laporan Perekonomian Indonesia. (<https://bps.go.id>). Diakses pada Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Indeks Pembangunan Manusia. (<https://bps.go.id>). Diakses pada Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. (<http://bps.go.id>). diakses pada Januari 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi. (<http://bappenas.go.id>). diakses pada Januari 2018
- Budiono. 1999. Ekonomi Makro, Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 2. BPFE: Yogyakarta
- Gujarati, Damodar N. 2006. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Irawan Drs,M.B.A dan Suparmoko Drs,M,M.A.Pg.D.2002. Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam. BPFE: Yogyakarta
- Jaoharul, Alam. 2006. Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi. Tesis diterbitkan. Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Karima Amalia, Sri. 2017. Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Tesis diterbitkan. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
- Kuncoro Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Lane, Jan-Erik dan Svante Ersson. 2002. Ekonomi Politik Komparatif Demokratisasi dan Pertumbuhan Benarkah Kontradiktif. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Lesmana, Teddy. 2007, Ketimpangan dan Ketertinggalan. Republika Sabtu 16 Juni 2007.
- Lukman Hakim, Ardhian. 2011. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Antar Wilayah di Jawa Timur (Studi Kasus Terhadap 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur). Skripsi diterbitkan. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Nemanja, Olivera dan Sasa, Obradovic. 2016. The Influence of Economic Growth on Regional Disparities: Empirical Evidence From OECD Countries. *Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business*, Vol. 34, No.1, 2016, 161-186.
- Putu Yusi, Pramandari. 2009. Analisis Disparitas Pembangunan di Provinsi Bali. Tesis diterbitkan. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Petrakos, Kallioras and Anagnostou, Ageliki. 2007. A Generalized Model of Regional Economic Growth in the European Union. *Dynamic Regions in a Knowledge Driven Global Economy Lessons and Policy Implications for the EU*. Vol. 12.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.
- Perdana, Ari A. 2005. Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan. *Blog Ekonomi*. Desember 2008.
- Qoni, Agus dan Nyoman, Suluh. Regional Disparity Level at West Papua Province. *International Journal of Environmental and Agriculture Research*, Vol. 3, No. 8.
- Sjafrizal. 1985. *Teori Ekonomi Regional: Konsep dan Perkembangan*. PT Gramedia: Jakarta
- Sudarmono, Mulyanto. 2006. Analisis Transformasi Struktural Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Wilayah Pembangunan I Jawa tengah. Tesis. Jogjakarta
- Sugiharti, L. (2012). *Desentralisasi Fiskal, Migrasi Internal, dan Konvergensi Pendapatan Regional di Jawa Timur (Sebuah Pendekatan Spasial)*. Brawijaya University.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah dan Dasar Kebijakan*. LPFE UI, Jakarta
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi 1 Edisi Kelima*. Erlangga: Jakarta
- Todaro, Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi 1 Edisi Kesebelas*. Erlangga: Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Udjianto dan Waluyo. 2002. Profil Ketimpangan Pendapatan Regional Antar Daerah dan Wilayah Indonesia. *Kompas* No. 24, 734-784